



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Laporan Tahunan

2018-2021

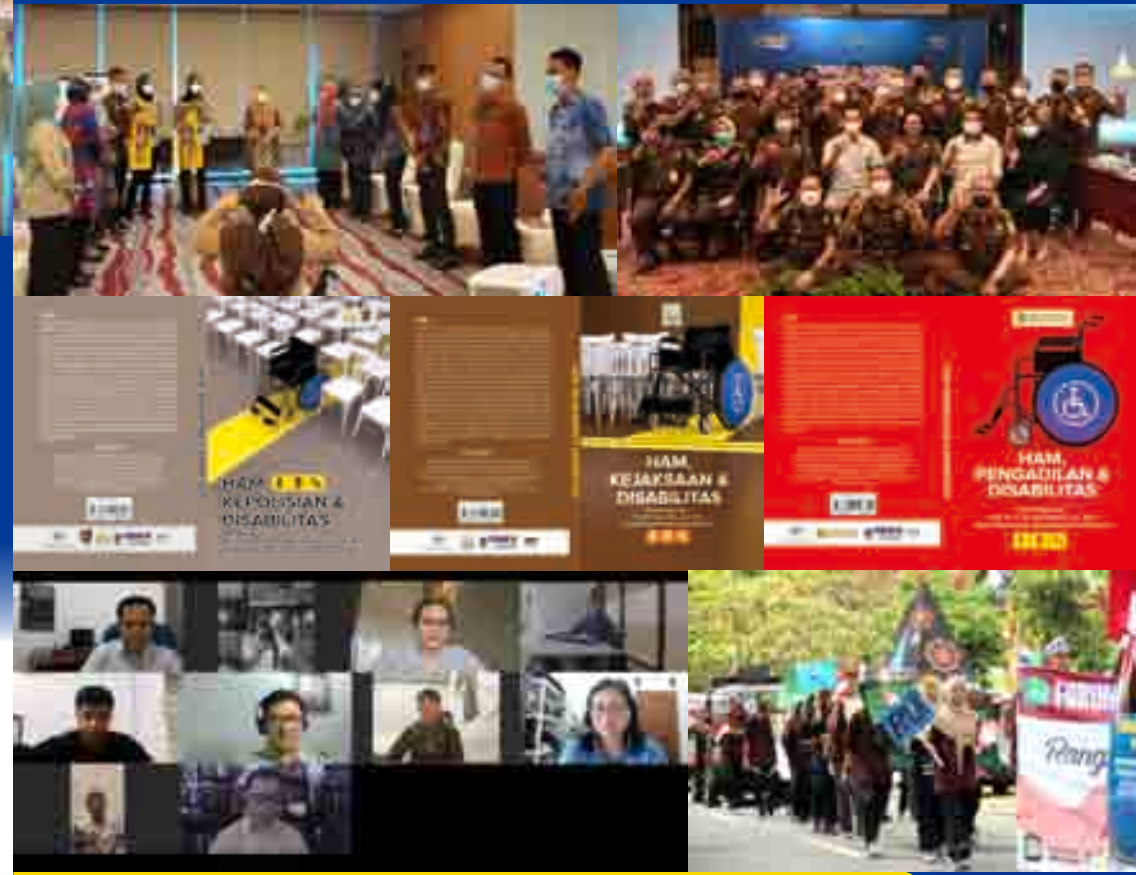
1 Januari 2018 - 31 Desember 2021



Annual Report

2018-2021
January 1 - December 31, 2021

PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA





PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Laporan Tahunan

2018-2021

1 Januari 2018 - 31 Desember 2021

Annual Report

2018-2021

January 1 - December 31, 2021

PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA



LAPORAN TAHUNAN PUSHAM UII

1 Januari 2018 - 31 Desember 2021

2022

Penyusun
Eko Riyadi
M. Syafi'ie
Despan Heryansyah
Nurdayad
Heronimus Heron
Nova U. Utomo
Astri Unun Pratiwi
Sahid Hadi
Alda Izzati

Penterjemah
Nova U. Utomo

Layout & Desain Sampul
Tarkima

Foto Dokumentasi
PUSHAM UII

Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung No. 517 A
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 452032 / Fax. (0274) 452158
Website: <https://www.pusham.uii.ac.id>
e-mail: pushamuii@yahoo.com

Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung No. 517 A
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 452032 / Fax. (0274) 452158
Website: <http://www.pusham.uii.ac.id>
e-mail: pushamuii@yahoo.com

Prepared by
Eko Riyadi
M. Syafi'ie
Despan Heryansyah
Nurdayad
Heronimus Heron
Nova U. Utomo
Astri Unun Pratiwi
Sahid Hadi
Alda Izzati
Translated by
Nova U. Utomo
Layout & Cover Design
Tarkima
Photos
PUSHAM UII

2022

January 1, 2018 - December 31, 2021

ANNUAL REPORT PUSHAM UII

Praise be to Allah SWT for all the blessings that have been bestowed upon us all. This report is a summary of the activities that have been performed by Pusham UII for the last four years, namely 2018-2021. In general, the activities cover four groups. The first is human rights capacity building for stakeholders. The second is human rights research. The third is the publication of various scientific works as well as communication media. Fourth is advocacy on various cases of human rights violations.

In the past four years, Pusham UII has worked on several major issues, namely the fulfillment of the right to a fair trial for persons with disabilities, protection and respect for religious communities, and the development of human rights legal methods. The first issue has been carried out through research and advocacy for policy changes in the National Police of Indonesia, the Attorney General's Office, the Supreme Court and the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Pusham UII also collaborates with the Investigating Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court to prepare educators for training materials on the rights of persons with disabilities.

The second issue is that the Pusham UII has collaborated with the Kulon Progo Regency Government to prepare a legal and social protection scheme in protecting religious communities, especially minority communities. The outcome that has been achieved is a consolidated civil society network to ensure active and effective cooperation and communication between religious communities in Kulon Progo. Another outcome was the passing of the Kulon Progo Regent's Regulation which regulates permits for the construction of houses and places of worship. This regulation is a legal breakthrough step in protecting religious communities, especially minorities.

The third issue is carried out through research on how human rights are used and

Foreword

Sambutan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas seluruh nikmat yang telah dikaruniakan untuk kita semua.

Laporan ini merupakan rangkuman dari kegiatan yang dilakukan oleh Pusham UII selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2018-2021. Secara umum, kegiatan yang dilakukan mencakup empat kelompok. *Pertama*, melakukan *capacity building* hak asasi manusia kepada para pemangku kepentingan. *Kedua*, melakukan penelitian hak asasi manusia. *Ketiga*, melakukan penerbitan atas berbagai karya ilmiah dan media komunikasi. *Keempat*, melakukan advokasi atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Empat tahun ini belakangan ini, Pusham UII telah bekerja pada beberapa isu besar yaitu pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas, perlindungan dan penghormatan komunitas beragama, dan pengembangan metode hukum hak asasi manusia. Isu pertama dilakukan dengan melakukan penelitian dan mengadvokasikan perubahan kebijakan di Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pusham UII juga bekerjasama dengan Diklat Reserse Kepolisian LEMDIKLAT POLRI, Badiklat Kejaksaan Agung, dan Pusdiklat Teknis Badan Diklat Litbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyiapkan tenaga pendidik untuk materi pelatihan hak penyandang disabilitas.

Isu kedua, Pusham UII bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyiapkan skema perlindungan hukum dan sosial dalam rangka melindungi komunitas agama-agama, khususnya komunitas minoritas. Luaran yang dicapai adalah jaringan masyarakat sipil yang terkonsolidasi untuk memastikan kerjasama dan komunikasi aktif efektif antar komunitas agama-agama di Kulon Progo. Luaran yang lain adalah disahkannya Peraturan Bupati Kulon Progo yang mengatur izin pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat. Peraturan ini merupakan langkah terobosan hukum dalam rangka melindungi komunitas agama, khususnya minoritas.

Isu ketiga dilakukan dengan melakukan penelitian tentang bagaimana hak asasi manusia digunakan dan diimplementasikan oleh lembaga peradilan di Indonesia. Pada bagian ini, Pusham UII menemukan adanya kemajuan walaupun sangat lambat dan kecil. Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dua bentuk pengadilan yang sudah cukup aktif menggunakan norma hak asasi manusia dalam memeriksa dan memutus perkara. Penelitian ini dilanjutkan dengan menawarkan kerangka metodologi baru bagi implementasi norma hak asasi manusia pada lembaga peradilan. Kerja besar ini akan dilakukan pada tahun 2022 ke depan.

Seluruh kegiatan tersebut dapat terselenggara karena dukungan dari mitra yang selalu mendukung terwujudnya gagasan besar lembaga Pusham UII. Pada kesempatan ini, sebagai Direktur mewakili seluruh jajaran pimpinan dan anggota PUSHAM UII, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pimpinan Universitas Islam Indonesia atas dukungannya sehingga lembaga ini tetap dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada *Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation (TAF), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*, atas kerjasama dan dukungannya sehingga kerja-kerja PUSHAM UII dapat terealisasi dengan baik.

Secara khusus, selaku Direktur saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota Dewan Pembina yaitu Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. (alm.), atas pengarahan dan bimbingannya. Terimakasih saya sampaikan kepada Muhammad Syafi'ie (Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Advokasi) dan Despan Heryansyah (Direktur Penelitian dan Publikasi), staf peneliti (Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza Zubarita, Heronimus Heron), serta seluruh staf kantor (Nur Dayad, Astri Unun, Nova Umiyati, Arwin Sriwahyu, Aniati Widyastuti, Tarkima, Dwi Putranto, Manu Supana, Parjono, Ambri (alm), dan Sukodono). Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya.

Eko Riyadi, S.H., M.H.
Direktur PUSHAM UII

implemented by the judiciary in Indonesia. In this regard, Pusham UII was able to find progress, albeit very slow and small. The Constitutional Court and the State Administrative Court are two courts that have been quite active in using human rights norms in examining and deciding cases. This research is continued by offering a new methodological framework for the implementation of human rights norms in the judiciary. This substantial assignment will be carried out in 2022.

All of the activities mentioned above can be held because of the support from partners for the realization of the major ideas of Pusham UII. As Director, representing the entire leadership and members of Pusham UII, I would like to thank the leadership of the Islamic University of Indonesia for their support so that this institution can still contribute positively to society. We also would like to thank the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation (TAF), and Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) for their cooperation and support so that our work is well implemented.

In particular, I would like to express my highest appreciation to the members of the Board of Trustees, namely Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Sc., Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M. Hum., (late) Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., for their direction and guidance. I would like to thank Muhammad Syafi'ie (Director of Education, Training and Advocacy), Despan Heryansyah (Director of Research and Publications), research staff (Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza Zubarita, Heronimus Heron), and all office staff (Nur Dayad, Astri Unun, Nova Umiyati, Arwin Sriwahyu, Aniati Widyastuti, Tarkima, Dwi Putranto, Manu Supana, Parjono, (late) Ambri, and Sukodono). Thank you for your dedication and hard work.

Eko Riyadi, S.H., M.H.
Director of PUSHAM UII

and the University is a coordinative rather than directive.

PUSHAM UII has full right and authority to determine programs, as well as cooperation with other institutions. The relationship between PUSHAM UII and the University is a coordinative rather than directive.

PUSHAM UII is an independent institution that emphasizes academic and scientific conditions in Indonesia. Islamic University of Indonesia academic community to try to improve human rights inequality. Such fact then evokes a deep concern and strong motivation among the marked by various forms of human rights violations, sufferings, miseries and social For more than three decades under the New Order regime, Indonesia's history Islamic University of Indonesia to the terrible human rights situation in Indonesia. The establishment of PUSHAM UII was a concern of academic community at the which was signed on April 7, 2000.

University of Indonesia with Hasballah M. Saad as Minister of State for Human Rights was a follow-up of the Memorandum of Understanding between the Rector of Islamic The Decree of Benefactor Board and the Rector of Islamic University of Indonesia Zaini Dahlan, M.A.

Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia, signed by Prof. of Indonesia Number 44/B.6/1V/2000 about the Appointment of Committee for Muhammad Djazman Alkindi ensued by the Decree of the Rector of Islamic University Board of Islamic University of Indonesia Number 9 of 2000 about the Establishment of officially founded on 20 April 2000 with the issuance of the Decree of Benefactor Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM-UII) was

History

About Us

Tentang Kami

Sejarah

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) secara resmi berdiri pada 20 April 2000 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Muhammad Djazman Alkindi disertai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 44/B.6/1V/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Prof. Zaini Dahlan, M.A.

Surat Keputusan Badan Wakaf dan Rektor Universitas Islam Indonesia itu merupakan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor Universitas Islam Indonesia dengan Hasballah M. Saad selaku Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada 7 April 2000.

Latarbelakang pembentukan PUSHAM UII adalah keprihatinan civitas akademika Universitas Islam Indonesia akan kondisi hak asasi manusia yang sangat buruk di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade di bawah rezim orde baru, sejarah Indonesia diwarnai dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, penderitaan dan kesengsaraan rakyat serta ketimpangan sosial. Kenyataan inilah yang melahirkan keprihatinan yang mendalam dan motivasi yang kuat di kalangan civitas akademika Universitas Islam Indonesia untuk berusaha memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia.

PUSHAM-UII merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah akademik dan netral dari kepentingan apapun. Sifat independen PUSHAM UII adalah penuh dalam arti PUSHAM UII memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan program, pengurus, serta kerjasama dengan

lembaga lain. Hubungan antara PUSHAM UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando.

Visi dan Misi

Menjadi pusat kajian hak asasi manusia yang utama, melakukan pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab.

Visi di atas akan direalisasikan dalam dua misi, yaitu :

1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelatihan praktis hak asasi manusia bagi masyarakat publik.
2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

Vision and Mission

Become leading human rights studies centre, in performing education and advocacy to encourage humane, democratic and civilized government and people of Indonesia.

The vision will then be realized into two missions, namely:

1. Promotion Mission which oriented to dissemination of human rights principles and practical training on human rights for the public.

2. Strengthening Mission that aimed to enable and strengthen the state and the society in implementing and protecting human rights and fundamental freedoms.

Daftar Isi

Laporan Tahunan 2018

Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakan



Laporan Keuangan 2018



Financial Statement 2018



Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Correctional Technical Implementing Unit

Annual Report 2018

Content

Daftar Isi

Laporan Tahunan 2019

A. *Piloting* Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta



B. Kegiatan Riset Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Enam Universitas di Yogyakarta



C. Terbangunnya *Peace Development System* untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo



Laporan Keuangan 2019



Financial Statement 2019



C. The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo



B. Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with Disabilities at Six Universities in Yogyakarta



A. Piloting the Disability Service Unit at the Correctional Technical Implementation Unit at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Special Region of Yogyakarta

Annual Report 2019

Content

Daftar Isi

Laporan Tahunan 2020

A. Program Aksesibilitas Lembaga Pemasyarakatan Bagi Penyandang Disabilitas



B. Penelitian tentang Peta Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia dalam Praktik Peradilan di Indonesia



C. Program Peradilan Yang Adil (*Fair*) Bagi Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum



Laporan Keuangan 2020



Financial Statement 2020



C. Fair Trial for Persons with Disabilities



B. Research on the Methodology Map of Human Rights Law in Judicial Practice in Indonesia



A. Accessibility of Correctional Institutions for Persons with Disabilities

Annual Report 2020

Content

Daftar Isi

Laporan Tahunan 2021

A. Pengembangan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dengan Fitur Unit Layanan Disabilitas



Organization Chart 2021

B. Pengembangan Konsep dan Praktik Jurisprudensi Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia



Financial Statement 2021

Laporan Keuangan 2021



B. Development of Concepts and Practices of Human Rights Law Jurisprudence in Indonesia



Struktur Organisasi 2021



A. Correctional Database System Development with Disability Service Unit Features



Annual Report 2021

Content



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Laporan Tahunan

2018

1 Januari - 31 Desember 2018

January 1 - December 31, 2018

2018

Annual Report

HAK ASASI MANUSIA

PUSAT STUDI



1

The article above becomes the basis for the Center for Human Rights Studies, Islamic University of Indonesia (PUSHAM UII) to prepare an advocacy plan for improving public services in correctional institutions. Therefore, PUSHAM UII conducted field research to get an overview of the real conditions of services, especially for persons with disabilities. The research locations are in Yogyakarta, Lampung, and Central Java.

The Government of Indonesia has legalized the specific law governing persons with disabilities on April 15, 2016, namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This is a follow-up step to the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This law also revokes the enactment of Law No. 4/1997 on the Disabled. The enactment of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities must be appreciated as a step forward. In this case, further work that must be done is to harmonize with other laws and carry out adequate dissemination.

Specifically, Article 37 of Law Number 8 of 2016 mandates that correctional institutions must provide Disability Service Units. The full text of the article is as follows:

a. State detention centers and correctional institutions are required to provide a Disability Service Unit.

b. The Disability Service Unit as referred to in paragraph (1) has the following functions:

(1) provide adaptation period services for prisoners with disabilities for a period of six months;

(2) providing special needs, including medicines that are adhered to for Persons with Disabilities during detention and assistance periods; and

(3) provide rehabilitation services for people with mental disabilities.

1. Background

Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Correctional Technical Implementing Unit

Programs

Program

Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang spesifik yang mengatur tentang penyandang disabilitas pada 15 April 2016, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengesahan ini merupakan sebuah tindak lanjut dari ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Undang-undang ini juga mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus diapresiasi sebagai sebuah langkah maju. Dalam hal ini, pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan adalah mengharmoniskan undang-undang yang lain serta melakukan diseminasi yang memadai.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan secara spesifik bahwa lembaga pemsarakatan harus menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Secara lengkap, Pasal tersebut mengamanatkan:

- a. Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
- b. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud berfungsi untuk:
 - (1) menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
 - (2) menyediakan kebutuhan spesifik, termasuk obat– obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
 - (3) menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pasal di atas menjadi basis bagi Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) untuk menyiapkan rencana advokasi pada perbaikan layanan publik di lembaga

pemasyarakatan. Oleh karena itu, PUSHAM UII melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata layanan terhadap penyandang disabilitas. Lokasi penelitiannya adalah di Yogyakarta, Lampung, dan Jawa Tengah.

2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah akses keadilan yang memadai bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan pola advokasi perbaikan layanan publik bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.
- b. Terwujudnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.
- c. Diseminasi hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

3. Deskripsi Kegiatan

a. Workshop Penyusunan Rencana Penelitian

Workshop dilakukan dengan dua tujuan utama yaitu (1) merefleksikan pengalaman dan informasi berbagai pihak mengenai situasi dan kondisi pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dan (2) merumuskan indikator penelitian berdasarkan refleksi dan informasi yang ada. Workshop dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan menghadirkan 20 peserta yang terdiri dari 5 (lima) peserta dari Jakarta, 5 (lima) peserta dari luar Jawa, 6 (enam) peserta dari Yogyakarta, dan 3 (tiga) orang tim peneliti. Workshop diawali dengan presentasi dari 3 (tiga) orang yaitu pejabat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, peneliti atau orang yang berpengalaman pada isu layanan pemasyarakatan, dan ahli disabilitas.

b. Penelitian Pemetaan Situasi dan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan untuk dua tujuan utama yaitu (1) mengidentifikasi

This research was conducted with two main objectives, (1) identifying trends in the types and barriers of persons with disabilities in correctional institutions; and (2) identifying problems in regulations, policies, standard operating procedures, and infrastructure for the fulfillment of the rights of persons with disabilities in correctional institutions. This identification is carried out on three aspects, namely

b. Mapping Research on the Existing Situation and Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Correctional Institutions.

The workshop was conducted with two main objectives, (1) reflecting on experiences and information from various parties on the situation and condition of the fulfillment of the rights of persons with disabilities in correctional institutions; and (2) formulating research indicators based on existing reflections and information. The workshop was held for two days by inviting twenty participants consisting of five from Jakarta, five from outside Java, six from Yogyakarta and three members of the research team. The workshop started with presentations from three resource persons, namely, officials at the Directorate General of Corrections, researchers or people with experience in correctional service issues, and disability experts.

3. Description of Activities

- a. **Research Planning Workshop**
- a. To create an advocacy pattern for improving public services for people with disabilities in correctional institutions.
- b. To create access to justice for persons with disabilities in correctional institutions.
- c. To disseminate the rights of persons with disabilities in correctional institutions.

2. Outcome and Output

The expected change from this program is Access to Justice for Persons with Disabilities in Correctional Institutions. The outputs of this program are as follows:

Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

collaboration with Pusham Uii and The Asia Foundation with the support of the Australia beneficiaries of this program are the Directorate General of Corrections. This program is and the Center for Detention Studies (CDS) who are directly involved in the research. The Partners in this activity are the Inclusion Center and the Difabel Advocacy Movement (SIGAB)

5. Collaborations

for persons with disabilities.

- b. Recommendations for policies regarding the accessibility of correctional institutions
- a. The results of the research on the existing condition of services for persons with disabilities in correctional institutions;

4. Results

from three researchers and continued with facilitation to formulate curriculum.

materials for correctional stakeholders. The workshop started with presentations be used as an outline for writing modules which will later be used as training previous research, the workshop will formulate a training curriculum which will also and summarizing the results of the field research; and (2) based on the results of The workshop was conducted with two main objectives, (1) discussing, reflecting

c. Workshop on Research Results and Curriculum Preparation Workshop

model and agree on various instruments to be used in the research.

academics, and practitioners. The workshop was conducted to agree on the research for one day by inviting nine participants consisting of representatives of DPOs, The research begins with a workshop for and by researchers. The workshop was held researchers in Yogyakarta, Central Java and Bali.

aspects of the stakeholders. The research was carried out for three months by four aspects of regulatory substance, aspects of institutional structure and cultural

kecenderungan ragam dan hambatan penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dan (2) mengidentifikasi problem regulasi, kebijakan, standar kerja (*standard operating procedure*), dan sarana-prasarana pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Identifikasi ini dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu aspek substansi regulasi, struktur kelambagaan, dan budaya *stakeholder*. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan oleh 4 (empat) orang peneliti di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali.

Penelitian diawali dengan workshop untuk dan oleh para peneliti. Workshop dilakukan selama 1 (satu) hari dengan menghadirkan 9 orang yang terdiri dari perwakilan Difable Person Organization, akademisi, dan praktisi. Workshop dilakukan untuk menyepakati model penelitian dan instrumen yang digunakan untuk penelitian.

c. Workshop Laporan Hasil Penelitian dan Penyusunan Kurikulum.

Workshop dilakukan untuk dua tujuan utama yaitu (1) mendiskusikan, merefleksikan, dan mengkristalkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan sebelumnya dan (2) berdasarkan hasil riset yang sebelumnya, merumuskan kurikulum pelatihan sekaligus akan dijadikan pedoman (*outline*) penulisan modul untuk bahan pelatihan bagi *stakeholder* lembaga pemasyarakatan. Workshop diawali dengan presentasi dari 3 (tiga) peneliti dan dilanjutkan dengan fasilitasi untuk meruskan kurikulum.

4. Hasil

- a. Laporan ilmiah terkait kondisi nyata layanan terhadap penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan;
- b. Rekomendasi kebijakan aksesibilitas lembaga pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas.

5. Kerja Sama

Mitra dalam kegiatan ini adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel dan Center for

Detention Studies yang terlibat langsung dalam penelitian. Penerima manfaat dalam program ini adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program ini diselenggarakan atas kerjasama PUSHAM UII dan The Asia Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

6. Bukti Kegiatan



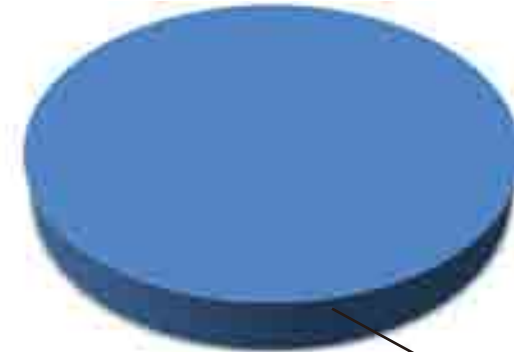
6. Proof of Activities

Laporan Keuangan

Pengelolaan Dana Program
 Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
 Tahun 2018

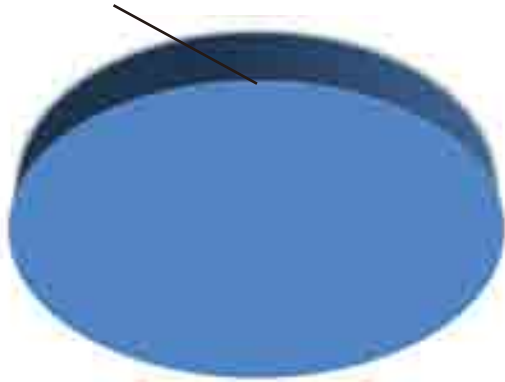
No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan	The Asia Foundation & AIPJ 2	363.653.770	100%	11 April - 31 Oktober 2018
TOTAL			363.653.770	100,00%	

Prosentase Pengelolaan Dana Program
 Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
 Tahun 2018



Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan 100%

Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Correctional Technical Implementing Unit 100%



Percentage of Project Fund Management Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia 2018

No.	Project Title	Donor Agency	Amount (Rp)	% ase	Period
1.	Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Correctional Technical Implementing Unit	The Asia Foundation & AIPJ 2	363.653.770	100%	11 April - 31 October 2018
TOTAL			363.653.770	100,00%	

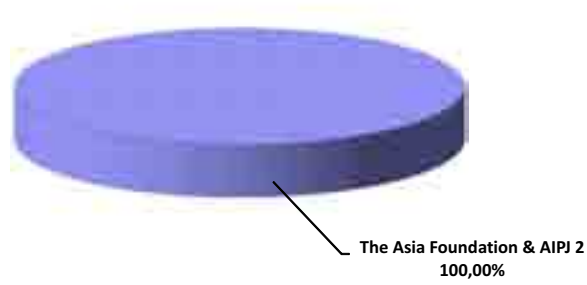
Project Fund Management Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia 2018

Financial Statement

**Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Tahun 2018**

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan	The Asia Foundation & AIPJ 2	363.653.770	363.653.770	100,00%
Total			363.653.770	363.653.770	100,00%

**Prosentase Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Tahun 2018**



No.	Project Title	Donor Agency	Amount (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Correctional Technical Implementing Unit	The Asia Foundation & AIPJ 2	363.653.770	363.653.770	100,00%
Total			363.653.770	363.653.770	100,00%

**Project Fund Management
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
2018**



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Laporan Tahunan

2019

1 Januari - 31 Desember 2019

January 1 - December 31, 2019

2019

Annual Report

PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA



Field research on the accessibility of prisons for persons with disabilities was conducted from July to October 2018. This research was conducted in all Technical Implementation Units under the guidance of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and Lampung Province. The Technical Implementing Units as intended include: Correctional Institutions; Women's Correctional Institution; Narcotics Correctional Institution; Juvenile Detention Center, Correctional Center, and the Detention Center. The research report produces three main recommendations, which include several steps to make correctional institutions accessible for people with disabilities. First, general standard setup. Second, optimizing the role of Community Research at the Correctional Center. Third, preparation of regulations and SOPs.

Reflecting on the above mentioned recommendations, the next follow-up plan that will be carried out and mutually agreed upon by PUSHAM UII with The Asia Foundation is to make a policy brief. This policy brief will include recommendations that will be given to policy makers and related institutions in preparing a correctional system that is accessible for persons with disabilities. However, due to various considerations, the scope of this policy brief only covers the Yogyakarta area. The big theme of the policy brief is the preparation for the establishment of the Disability Service Unit. This Disability Service Unit is the main orientation in the policy brief because from the regulatory aspect of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, it has been stated directly about the obligation of the Technical Implementing Unit to establish a Disability Service Unit. In addition, the technical consideration is that the formation of a Disability Service Unit is the most feasible way to make the correctional system accessible for persons with disabilities with all the existing resource limitations. In that

1. Background

A. Piloting the Disability Service Unit at the Correctional Technical Implementation Unit at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Special Region of Yogyakarta

A. Piloting Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Latar Belakang

Penelitian lapangan terkait dengan aksesibilitas lembaga pemsarakatan bagi penyandang disabilitas telah diselenggarakan dari Juli sampai Oktober 2018. Penelitian ini dilakukan di seluruh Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lampung. Unit Pelaksana Teknis dimaksud meliputi Lembaga Pemsarakatan; Lembaga Pemsarakatan Khusus Perempuan, Lembaga Pemsarakatan Narkotika, Lembaga Pemsarakatan Khusus Anak, Balai Pemsarakatan, dan Rumah Tahanan. Laporan penelitian menghasilkan tiga rekomendasi pokok, mencakup beberapa langkah untuk mewujudkan Unit Teknis Pemsarakatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. *Pertama*, penyiapan Standar Umum. *Kedua*, optimalisasi Peran Litmas pada Balai Pemsarakatan. *Ketiga*, penyiapan regulasi dan *standard operating procedure*.

Berkaca pada rekomendasi di atas, tindak lanjut yang dilakukan dan disepakati bersama oleh PUSHAM UII dengan The Asian Foundation adalah membuat *policy brief* yang mencakup rekomendasi untuk pemangku kebijakan dan lembaga terkait dalam menyiapkan sistem pemsarakatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun, karena pertimbangan berbagai hal, cakupan *policy brief* ini hanya meliputi wilayah Yogyakarta.

Tema besar *policy brief* adalah penyiapan pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas menjadi pokok orientasi karena dari aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menyebutkan langsung kewajiban Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas. Selain itu, ada juga pertimbangan teknis bahwa Unit Layanan Disabilitas merupakan jalan paling memungkinkan untuk mewujudkan sistem pemsarakatan yang aksesibel bagi penyandang

disabilitas dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, PUSHAM UII melakukan *piloting* pembentukan Unit Layanan Disabilitas pertama di Indonesia, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi aksesibel bagi penyandang disabilitas. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. *Policy brief* mengenai Unit Layanan Disabilitas bagi masing-masing Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Terbentuknya Unit Layanan Disabilitas di masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah ruang lingkup Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Deskripsi kegiatan

a. Penyusunan *policy brief*

Policy Brief dikerjakan oleh (3 orang) dari PUSHAM UII . Waktu yang dibutuhkan kurang lebih selama satu bulan (April). Penyusunan juga diperkaya dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait.

b. *Workshop finalisasi policy brief*

Workshop diselenggarakan di Yogyakarta pada akhir bulan April dengan menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Yogyakarta serta beberapa pakar disabilitas dan lembaga pemasarakatan. Peserta kegiatan ini adalah 20 orang dari Yogyakarta dan 2 orang dari Jakarta sebagai ahli.

The workshop was held in Yogyakarta at the end of April by inviting the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta along with all Heads of Correctional Technical Implementation Units in Yogyakarta as well as several experts on disability and correctional institutions. This event was attended by 20 participants from Yogyakarta and 2 from Jakarta as experts.

b. *Policy brief finalization workshop*

The Policy Brief was carried out by three members of the PUSHAM UII team. The time required is one month in April. The preparation was also enriched by in-depth interviews with related parties.

a. *Preparation of policy brief*

3. Description of Activities

The establishment of a Disability Service Unit in each Correctional Technical Implementation Unit under the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta.

a. Policy brief regarding the Disability Service Unit for each Correctional Technical Implementation Unit under the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta;

The expected change from this program is for the Correctional Technical Implementing Unit under the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta to become accessible for Persons with Disabilities. The output of this program is as follows:

2. Outcome and Output

Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta.

in the future. This activity was held in October 2019.

evaluation is important for improving the roles and tasks of the Disability Service Unit establishment of the Disability Service Unit that had been implemented. This evaluation activity was held to find out various inputs and weaknesses from the

e. Evaluation of the Establishment of a Disability Service Unit

Region of Yogyakarta.

was held at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special persons are the team from PUSHAM UII and representatives from SIGAB. The activity Unit. The training was held twice in August 2019, with 24 participants. The resource for the staff of each Technical Implementing Unit who will handle the Disability Service in order to support the establishment of the Disability Service Unit, training was held

d. Disability Service Unit Development

Special Region of Yogyakarta.

Disability Service Unit at the Correctional Technical Implementation Unit in the Yogyakarta number W.14-5351.Pk.01.06.01 of 2019 about the Formation of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of July 2019. One of the results of this workshop is the issuance of a Circular of the Head people from Jakarta with representatives of persons with disabilities, and was held in and the organizational aspects. This activity was attended by 20 participants plus two the form and structure of the Disability Service Unit as well as its duties, authorities regarding the establishment of the Disability Service Unit. This activity also discussed Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta commitment with all Correctional Technical Implementation Units and the Regional This activity is an initial follow-up after the preparation of a policy brief to build a joint

c. Workshop on the establishment of Disability Service Unit

c. Workshop pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut awal pasca penyusunan *policy brief* untuk membangun komitmen bersama dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Kegiatan ini juga membicarakan bentuk dan struktur, tugas dan kewenangan, serta aspek keorganisasian Unit Layanan Disabilitas. Peserta kegiatan adalah 20 orang ditambah 2 (dua) orang dari Jakarta dengan perwakilan penyandang disabilitas. Workshop ini diselenggarakan pada Juli 2019. Salah satu hasil dari workshop ini adalah penerbitan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.14-5351.Pk.01.06.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Pengembangan Unit Layanan Disabilitas

Dalam rangka mendukung pembentukan Unit Layanan Disabilitas, PUSHAM UII menyelenggarakan pelatihan terhadap pegawai dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang bertugas pada Unit Layanan Disabilitas. Pelatihan diselenggarakan selama dua kali pada Agustus 2019, dengan peserta berjumlah 24 orang. Narasumber adalah tim PUSHAM UII dan perwakilan dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Kegiatan diselenggarakan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Evaluasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Kegiatan evaluasi ini diselenggarakan untuk mengetahui berbagai masukan serta kelemahan dari pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang sudah dilaksanakan. Evaluasi ini penting sebagai tindak lanjut perbaikan peran dan tugas Unit Layanan Disabilitas di masa depan. Kegiatan ini selenggarakan pada Oktober 2019.

4. Hasil

- a. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.14-5351.Pk.01.06.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Peningkatan kapasitas staf Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakat.
- c. *Policy brief* pembentukan Unit Layanan Disabilitas Nasional.

5. Kerja Sama

Mitra dalam kegiatan ini adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak. Penerima manfaat dari program ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang ada di Yogyakarta. Program ini diselenggarakan atas kerjasama PUSHAM UII dengan The Asia Foundation dan atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities

4. Results

- a. Circular Letter of the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta number W.14-5351.Pk.01.06.01 of 2019 about the Formation of the Disability Service Unit at the Correctional Technical Implementation Unit in the Special Region of Yogyakarta.
- b. Capacity building for Disability Service Unit staff at the Correctional Technical Implementation Unit.
- c. Policy brief on the establishment of a National Disability Service Unit.

5. Collaborations

Partners in this activity are the Inclusion Center and the Advocacy Movement for Disabilities, the Women, Disability, and Children Advocacy Center, while the beneficiary institutions are the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta and the Correctional Technical Implementation Unit in Yogyakarta. This program is a collaboration between PUSHAM UII and The Asia Foundation with support from the Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

This research was initiated with a workshop for determining field assessment indicators and data analysis. This workshop was held at the PUSHAM UII Office by involving experts for field research. After the indicators were set, PUSHAM UII recruited three enumerators and trained them for data collection in the field. Enumerators collected data at six universities in Special

3. Description of Activities

The expected change from this research is that knowledge of human rights for persons with disabilities becomes a practical discipline in encouraging the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of education. The output of this research is a report that describes the existing situation of the fulfillment of the right to accessibility of persons with disabilities in higher education.

2. Output and Outcome

With the enactment of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, normative guarantees for the rights of persons with disabilities in the field of education have become more adequate. These rights relate to the availability, accessibility, acceptability, and quality of education that is appropriate and in accordance with the specific needs of persons with disabilities. Unfortunately, since Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities was passed in 2016, no field-based studies have been identified specifically to assess the existing situation of higher education. Therefore, PUSHAM UII took the initiative to conduct a field-based research, especially in Yogyakarta. Through this research, PUSHAM UII wants to present the empirical reality of the fulfillment of the right to accessibility for persons with disabilities in higher education.

1. Background

Disabilities at Six Universities in Yogyakarta

B. Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with

B. Kegiatan Riset Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Enam Universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Latar Belakang

Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jaminan normatif untuk hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan menjadi lebih memadai. Hak-hak dimaksud berkenaan dengan ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan kualitas pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap penyandang disabilitas. Sayangnya, sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan pada 2016, belum teridentifikasi penelitian-penelitian berbasis lapangan yang dilakukan untuk menilai situasi nyata pendidikan tinggi. Oleh karena itu, PUSHAM UII berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian berbasis lapangan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui penelitian ini, PUSHAM UII hendak menyajikan realitas empiris pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan tinggi.

2. Output dan Outcome

Perubahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengetahuan tentang hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas menjadi sebuah disiplin yang praktikal dalam mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Luaran dari penelitian ini adalah tersedianya sebuah laporan yang menggambarkan situasi nyata pemenuhan hak atas aksesibilitas penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

3. Deskripsi kegiatan

Secara bertahap, kegiatan penelitian ini diawali dengan sebuah workshop untuk penetapan indikator asesmen lapangan dan analisis data. Workshop ini dilakukan di Kantor PUSHAM UII dengan melibatkan ahli-ahli untuk penelitian lapangan. Setelah indikator ditetapkan,

PUSHAM UII melakukan rekrutmen tiga orang enumerator dan menyelenggarakan pelatihan bagi enumerator untuk keperluan pengumpulan data di lapangan. Enumerator melakukan pengumpulan data di enam universitas di Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Setelah enumerator selesai mengumpulkan data lapangan, penelitian dilanjutkan dengan sebuah workshop lanjutan untuk memetakan temuan data lapangan. Setelah memastikan data yang terkumpul sesuai dengan indikator asesmen, dilakukanlah pembacaan dan analisis data dengan merujuk ke indikator yang telah ditetapkan. Sebagai tahap akhir penelitian, kegiatan yang dilakukan adalah penulisan laporan riset dan sebuah diskusi publik yang dilakukan di Yogyakarta pada Desember 2019.

4. Hasil

Penelitian ini menemukan, pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat minimum. Situasi ini mengakibatkan penyandang disabilitas menghadapi pelbagai hambatan untuk mengakses dan menikmati pendidikan tinggi. Hambatan dimaksud mulai dari (a) hambatan sarana-prasarana fisik dan mobilitas, (b) hambatan perilaku, (c) hambatan hukum dan prosedurnya, (d) hambatan sumber daya, dan (e) hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini menyibak suatu kenyataan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi masih belum inklusif bagi penyandang disabilitas.

5. Kerja Sama

Pelaksanaan riset ini didukung oleh kerja sama dengan beberapa pihak. Mitra riset ini terdiri dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Athmajaya Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia.

The implementation of this research is supported by collaboration with several parties. The research partners consist of Islamic University of Indonesia, Gadjah Mada University, Yogyakarta State University, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta Muhammadiyah University, and Atmajaya University Yogyakarta. This research is supported by the Directorate of Research and Community Service, Islamic University of Indonesia.

5. Collaborations

This research found that the fulfillment of the rights of accessibility of persons with disabilities in higher education in the Special Region of Yogyakarta is still very minimal. This situation causes people with disabilities to face various obstacles to access and enjoy higher education. These barriers range from (a) physical infrastructure and mobility barriers, (b) behavioral barriers, (c) legal and procedural barriers, (d) resource barriers, and (e) technological, information and communication barriers. Thus, this research uncovered a fact that the implementation of higher education is still not inclusive for people with disabilities.

4. Results

Region of Yogyakarta, namely, Islamic University of Indonesia, Gadjah Mada University, Yogyakarta State University, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta Muhammadiyah University, and Atmajaya University Yogyakarta. After the findings of the finished collecting field data, a follow-up workshop was carried out to map the findings of the field data. After ensuring that the data collected is in accordance with the assessment indicators, the data is read and analyzed by referring to the indicators that have been set. As the final stage of the research, this was completed by writing a research report and a public discussion held in Yogyakarta in December 2019.



6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities





PUSHAM UII



C. The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo

1. Background

Yogyakarta is known as a city of tolerance, although it must be admitted that there are still sparks of conflict and the potential for conflict on a very small scale. This is understandable considering that the composition of the people of Yogyakarta is heterogeneous. As an area that has declared itself as a tolerant city, Yogyakarta faces serious challenges in the form of many cases showing exclusivity between religious groups, both within certain religions or between religions.

Based on these conditions, PUSHAM UII created a program to build encounters among religious communities based in Kulon Progo, encourage the strengthening of religious harmony forums, and connect diverse religious communities with policy makers to establish in line communication, collaboration, and enthusiasm to resolve various conflicts, especially in the name of religion and belief.

2. Outcome and Output

The changes that are expected from this program are *first*, national institutions and local government are able to carry out the function of promoting religious freedom at the Local level. *Second*, local civil society is consolidated to promote religious freedom. *Third*, collaboration agreements between local government and civil society actors to protect religious freedom. The output of this program is as follows:

- a. draft paper/policy brief regarding the formulation of the peace development system of the local government of Kulon Progo in protecting religious freedom;
- b. the establishment of communication, conditions of mutual learning between religious communities, and the existence of a joint forum in maintaining religious freedom in Kulon Progo;

C. Terbangunnya *Peace Development System* untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo

1. Latar Belakang

Yogyakarta dikenal sebagai sebuah kota toleran (*city of tolerance*), meskipun harus diakui bahwa masih ada berbagai percikan konflik dan potensi konflik dengan skala yang sangat kecil. Hal ini dapat dimaklumi mengingat komposisi masyarakat Yogyakarta adalah heterogen. Sebagai daerah yang telah mendeklarasikan diri sebagai kota toleran, Yogyakarta menghadapi tantangan serius berupa banyaknya kasus yang memperlihatkan eksklusivitas antar kelompok keagamaan, baik di internal agama tertentu maupun antar agama.

Berpijak pada kondisi tersebut, PUSHAM UII menyelenggarakan sebuah program untuk membangun pertemuan antar komunitas keagamaan dengan berbasis di Kulon Progo, mendorong diperkuatnya forum kerukunan beragama, dan menyambungkan komunitas keagamaan yang beragam dengan para pemangku kebijakan agar terjalin komunikasi, kolaborasi, dan semangat yang seirama untuk menyelesaikan beragam konflik, khususnya yang mengatasnamakan agama dan keyakinan.

2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, institusi nasional dan pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi promosi kebebasan beragama di level daerah. *Kedua*, masyarakat sipil daerah terkonsolidasi untuk mempromosikan kebebasan beragama. *Ketiga*, perjanjian kolaborasi antara pemerintah daerah dan aktor masyarakat sipil untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut.

- a. draf paper/policy brief formulasi *peace development system* Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan;
- b. terjalannya komunikasi, kondisi saling belajar antar komunitas keagamaan, dan adanya forum bersama dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kulon Progo;

- c. adanya jalinan komunikasi antara PUSHAM UII, komunitas, dan pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas program

3. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan inti dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. Audiensi dan dialog ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan aspirasi mengenai kondisi sosial keagamaan di Kulon Progo yang dilaksanakan pada Mei 2019 di Kantor Bupati Kulon Progo dan rumah dinas Drs. Sutedjo pada Juli 2019.
- b. Menyusun Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat bersama Bagian Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kulon Progo di wisata alam Kalibiru, Kokap Kulon Progo pada Juli 2020.
- c. Menyusun instrumen verifikasi dan validasi izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang berdiri sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 pada Agustus 2020.
- d. Mendorong Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk menganggarkan kegiatan kerukunan dan toleransi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020.
- e. Bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan PUSAD Paramadina untuk melakukan pelatihan mediasi konflik pada Februari 2021, dan menyusun *standard operating procedure* mediasi konflik umat beragama pada Agustus 2021.
- f. PUSHAM UII bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo pada tahun 2021. Naskah ini masih diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon Progo di Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta supaya menjadi Peraturan Daerah tentang

The core activities of this program are as follows:

- a. A discussion with the Local Government of Kulon Progo to get aspirations regarding the socio-religious conditions in Kulon Progo which was held in May 2019, at the Kulon Progo Regent's Office and the official residence of the Regent Drs. Sutedjo on July 2019.
- b. Drafting Kulon Progo Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning Permits to Establish Houses of Worship and Places of Worship with the Legal Department of the Kulon Progo Local Government, the National and Political Unity Agency, Ministry of Religion Office and the Kulon Progo Religious Harmony Forum in Kalibiru nature tourism, Kokap Kulon Progo on 3-4th July 2020
- c. Prepare instruments for verification and validation of permits for houses of worship that were established before the issuance of Regent Regulation Number 52 of 2020 in August 2021.
- d. Encouraging the Kulon Progo local government to budget for activities of harmony and tolerance in the Local Revenue and Expenditure Budget as stated in the Budget Implementation Document for the Local Work Units of the National and Political Unity Agency for the 2020 Fiscal Year.
- e. In collaboration with the Office of the Ministry of Religion, the Religious Harmony Forum and the Center for the Study of Religion and Democracy Paramadina conducted conflict mediation training in February 2021, and made a standard operating procedure for mediating religious conflicts in August 2021.
- f. PUSHAM UII together with the Kulon Progo Government made an academic paper on the Draft Local Regulation on Religious Harmony in Kulon Progo in 2021. This draft is still being fought for by the Kulon Progo Government together with the Kulon Progo Parliament at the Legal Bureau of the Special Region of Yogyakarta Government to become a Local

3. Description of Activities

- c. communication between PUSHAM UII, community, and local government in carrying out program activities

- Regulation on Religious Harmony in Kulon Progo.
- g. PUSHAM UII in collaboration with the Local Government, the Office of the Ministry of Religion and the Kulon Progo Religious Harmony Forum held an interfaith youth camp as a means of bringing youths from each religion in the Kalibiru nature tourism area, Hargowilis Village, Kokap, Kulon Progo in July 2019.
- h. PUSHAM UII was involved in drafting the Bylaws and together with the Office of the Ministry of Religion and the Religious Harmony Forum inaugurated the organizer members of the Interfaith Youth Forum at Dolan Deso Boro, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo in November 2019.
- i. PUSHAM UII together with the Interfaith Youth Forum and Religious Harmony Forum held an interfaith youth carnival to promote interfaith brotherhood in Kulon Progo in August 2019.
- j. PUSHAM UII together with the Bantul Religious Harmony Forum took the initiative to hold a Bantul interfaith youth meeting and form the Bantul Interfaith Youth Forum in early 2020.
- k. PUSHAM UII in collaboration with the Kulon Progo Office for Education, Youth and Sports, the Office of the Ministry of Religion, the National and Political Unity Agency, the Religious Harmony Forum, the Police and the Interfaith Youth Forum held a nine-series nationalist school from February to September 2021. The participants of the nationalist school were interfaith youth of Kulon Progo who visited houses of worship, Islamic boarding schools, Muhammadiyah organizations and Nahdlatul Ulama organizations to learn to understand the sanctity of religions and the role of organizations in developing Indonesia. From this activity, participants gain knowledge about sacred boundaries and sacred symbols of religions that need to be respected. Nationalist schools are also conducted online and involve the Bantul Agency Interfaith Youth Forum.
- l. PUSHAM UII together with the Kulon Progo women's network formed the Women in Kebaya organization in 2020. The Women in Kebaya organization consists of women of

- Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo.
- g. PUSHAM UII bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kulon Progo untuk menyelenggarakan kemah pemuda lintas agama sebagai sarana yang mempertemukan pemuda dari masing-masing agama di kawasan wisata alam Kalibiru, Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo pada Juli 2019.
- h. PUSHAM UII terlibat dalam penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan bersama Kantor Kementerian Agama serta Forum Kerukunan Umat Beragama mengukuhkan pengurus Forum Pemuda Lintas Agama di Dolan Deso Boro, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo pada November 2019.
- i. PUSHAM UII bersama Forum Pemuda Lintas Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama melaksanakan karnaval pemuda lintas agama untuk mempromosikan persaudaraan antar agama di Kulon Progo pada Agustus 2019.
- j. PUSHAM UII bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Bantul berinisiatif untuk mengadakan pertemuan pemuda lintas agama Bantul dan membentuk Forum Pemuda Lintas Agama Bantul awal tahun 2020.
- k. PUSHAM UII bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kepolisian dan Forum Pemuda Lintas Agama mengadakan sekolah kebangsaan satu sampai sembilan pada bulan Februari sampai September 2021. Para peserta sekolah kebangsaan terdiri dari pemuda lintas agama Kulon Progo mengunjungi rumah ibadat, pondok pesantren, organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama untuk belajar memahami kesucian agama-agama dan peran organisasi dalam membangun Indonesia. Dari kegiatan ini, para peserta mendapatkan pengetahuan tentang batas suci dan simbol suci agama-agama yang perlu dihormati. Sekolah kebangsaan juga dilakukan secara online dan melibatkan FPLA Kabupaten Bantul.
- l. PUSHAM UII bersama jaringan perempuan Kulon Progo membentuk organisasi Perempuan Berkebaya pada 2020. Organisasi Perempuan Berkebaya terdiri dari

perempuan lintas agama dan keyakinan yang mempromosikan perdamaian dan toleransi melalui aktivitas budaya.

- m. PUSHAM UII membangun hubungan yang baik dengan *key persons* di pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, organisasi pemuda lintas agama dan organisasi perempuan di masing-masing agama.
- n. Dialog dan pertemuan antar komunitas masyarakat dengan pemerintah daerah sebulan sekali dari tahun 2019 sampai 2021. Dialog dilaksanakan di komunitas agama maupun di balai-balai desa yang ada di Kulon Progo.
- o. PUSHAM UII melakukan pendampingan terhadap Forum Pemuda Lintas Agama Kulon Progo untuk audiensi dengan pemerintah daerah dan tokoh agama yang ada di Kulon Progo untuk memastikan dukungan terhadap keberlanjutan serta regenerasi Forum Pemuda Lintas Agama Kulon Progo.
- p. Dialog yang melibatkan komunitas perempuan lintas agama seperti Fatayat, Nasyaitul Aisyiyah, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Wanita Teravada Indonesia (Wandani), wanita penghayat, perempuan gereja Kristen, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan organisasi perempuan lainnya bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kebudayaan untuk membicarakan kerukunan dari perspektif perempuan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Perempuan Berkebayu Kulon Progo tahun 2020.
- q. Melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas Perempuan Berkebayu Kulon Progo untuk merumuskan program kerja dan kepedulian pada masalah sosial, misalnya menginisiasi donasi dan bagi-bagi sembako bagi lansia yang terdampak pandemi COVID-19 pada April 2020.
- r. PUSHAM UII melakukan pendampingan terhadap Perempuan Berkebayu untuk audiensi dengan pemerintah daerah Kulon Progo dan komunitas masyarakat sipil untuk memastikan keberlangsungan organisasi Perempuan Berkebayu dan advokasi kasus-kasus perempuan dan anak di Kulon Progo.

cross faiths and beliefs who promote peace and tolerance through cultural activities.

m. PUSHAM UII maintains good relations with key persons in local government, Ministry of Religion Office, Religious Harmony Forum, interfaith youth organizations and women's organizations in each religion.

n. Dialogues and meetings between communities and local government once a month from 2019 to 2021. Dialogues have been carried out in religious communities and in village halls in Kulon Progo.

o. PUSHAM UII provided assistance to the Kulon Progo Interfaith Youth Forum to meet and discuss with the Regional Government and religious leaders in Kulon Progo to ensure support for the continuation and regeneration of the Kulon Progo Interfaith Youth Forum.

p. Dialogue involving interfaith women's communities such as Fatayat, Nasyaitul Aisyiyah, Catholic Women of the Republic of Indonesia, Indonesian Teravada Women, women of beliefs, Christian church women, Joint Women's Organizations and other women's organizations with the National and Political Unity Agency, Office of Social, Women's Empowerment and Child Protection, Ministry of Religion Office, Cultural Office to discuss harmony from the perspective of women who became the forerunner to the formation of Women in Kebaya Kulon Progo in 2020.

q. Conducting training and strengthening the capacity of Women in Kebaya Kulon Progo to create work programs and concerns on social issues, for example, initiating donations and distribution of basic necessities for the elderly affected by the COVID-19 pandemic in April 2020.

r. PUSHAM UII provides assistance to Women in Kebaya to meet and discuss with the local Government of Kulon Progo and civil society communities to ensure the continuity of Women in Kebaya organization and advocate for cases of women and children in Kulon Progo.

Department of Kulon Progo. This program is supported by The Asia Foundation.

Bantul National and Political Unity Agency, the Kulon Progo Office of Social Affairs, the Legal and Bantul Police, the Kulon Progo and Bantul Ministries of Religion, the Kulon Progo and Local Governments, the Kulon Progo and Bantul Religious Harmony Forum, the Kulon Progo women's organizations. The beneficiaries of the program are the Kulon Progo and Bantul and Bantul religious institutions, Women in Kebaya of Kulon Progo, Kulon Progo religious Partners in this program are the Kulon Progo and Bantul Interfaith Youth Forum, Kulon Progo

5. Collaborations

Progo.

together with Women in Kebaya in assisting the cases of women and children in Kulon

h. The involvement of the Office of Social, Women's Empowerment and Child Protection

Progo in maintaining harmony and tolerance in Kulon Progo.

g. The coordination of interfaith youth, religious leaders and the local government of Kulon

f. The establishment of cooperation between interfaith youth in Bantul.

e. Organization of Women in Kebaya.

d. Interfaith Youth Forum Organization.

c. Academic Paper of Regional Regulations on Religious Harmony.

of religion and belief.

b. There is a budget in the Local Revenue and Expenditure Budget for activities on freedom

Worship and Places of Worship.

a. Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning the Establishment of Houses of

The results of the program are as follows:

4. Results

4. Hasil

Hasil dari program adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat.
- b. Anggaran APBD untuk kegiatan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- c. Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kerukunan.
- d. Organisasi Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA).
- e. Organisasi Perempuan Berkebaya.
- f. Terbangunnya kerjasama antar pemuda lintas agama di Kabupaten Bantul.
- g. Terkoordinasinya pemuda lintas agama, tokoh agama dan pemerintah daerah Kulon Progo dalam menjaga kerukunan dan toleransi di Kulon Progo.
- h. Terlibatnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Perempuan Berkebaya dalam mendampingi kasus perempuan dan anak di Kulon Progo.

5. Kerja Sama

Mitra program ini adalah Forum Pemuda Lintas Agama Kulon Progo dan Bantul, lembaga keagamaan Kulon Progo dan Bantul, Perempuan Berkebaya Kulon Progo, Organisasi perempuan keagamaan Kulon Progo. Penerima manfaat program adalah Pemerintah Daerah Kulon Progo dan Bantul, FKUB Kulon Progo dan Bantul, Resort Kepolisian Kulon Progo dan Bantul, Kementerian Agama Kulon Progo dan Bantul, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kulon Progo dan Bantul, Dinas Sosial Kulon Progo, Bagian Hukum Kulon Progo. Program ini didukung oleh The Asia Foundation.

6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities

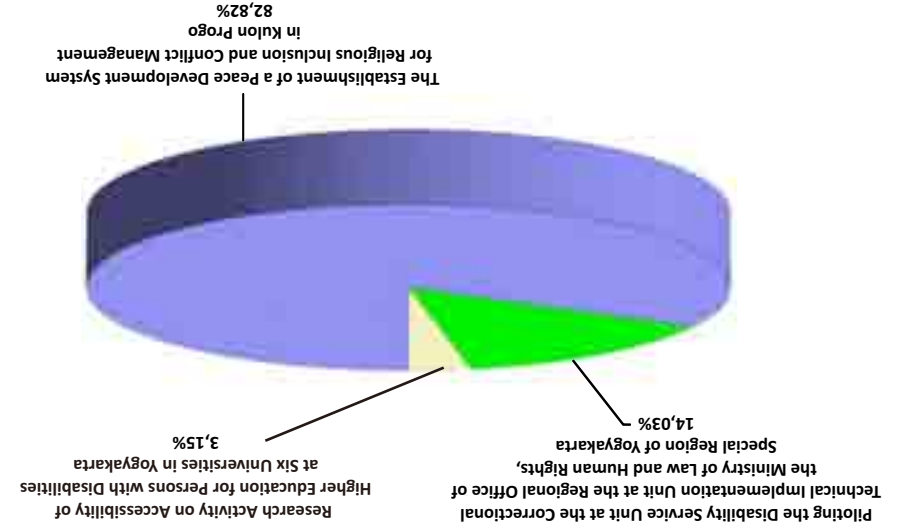


Laporan Keuangan

Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Januari - Desember 2019

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Terbangunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	604.246.460	82,82%	1 April - 31 Desember 2019
2.	Piloting Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta	The Asia Foundation & AIPJ 2	102.345.000	14,03%	4 April - 30 November 2019
3.	Kegiatan Riset Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Enam Universitas di Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	23.000.000	3,15%	November - Desember 2019
TOTAL			729.591.460	100,00%	

Prosentase Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Januari - Desember 2019



Percentage of Project Fund Management
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
January - December 2019

No.	Project	Donor Agency	Amount (Rp)	% age	Period
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	604.246.460	82,82%	1 April - 31 Desember 2019
2.	Piloting the Disability Service Unit at the Correctional the Ministry of Law and Human Rights, Special Region of Yogyakarta	The Asia Foundation & AIPJ 2	102.345.000	14,03%	4 April - 30 November 2019
3.	Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with Disabilities at Six Universities in Yogyakarta	Islamic University of Indonesia	23.000.000	3,15%	November - Desember 2019
TOTAL			729.591.460	100,00%	

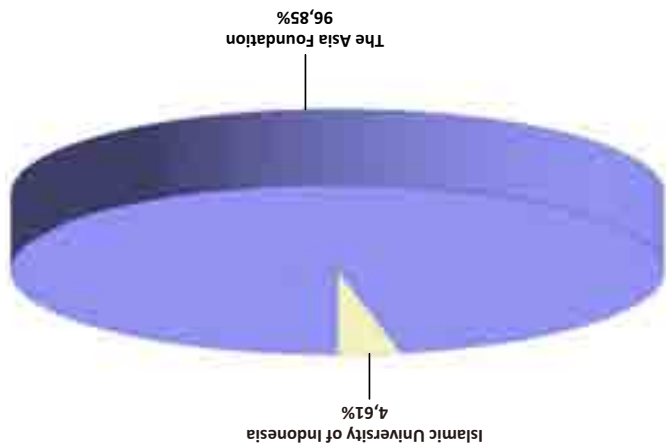
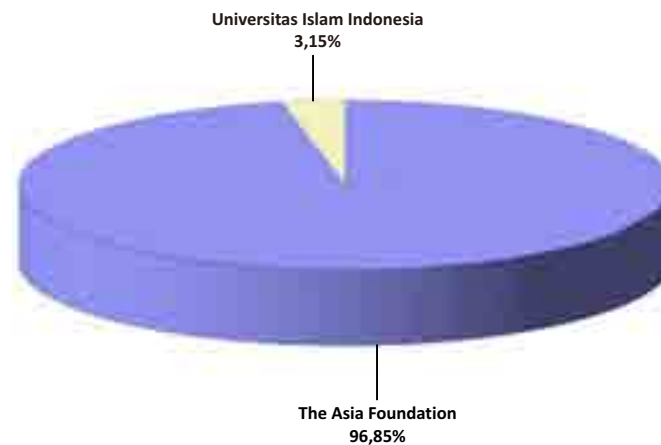
Project Fund Management
Center For Human Rights Studies Islamic University Of Indonesia
January - December 2019

Financial Statement

**Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Januari - Desember 2019**

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Terbanggunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	604.246.460	706.591.460	96,85%
	Piloting Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta		102.345.000		
2.	Kegiatan Riset Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Enam Universitas di Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	23.000.000	23.000.000	3,15%
Total			729.591.460	729.591.460	100,00%

**Prosentase Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Januari - Desember 2019**



**Percentage of Project Fund Management
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
January - December 2019**

No.	Project Title	Donor Agency	Amount (Rp)	Sub Total	% ase
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	604.246.460	706.591.460	96,85%
	Piloting the Disability Service Unit at the Correctional Technical Implementation Unit at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Special Region of Yogyakarta		102.345.000		
2.	Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with Disabilities at Six Universities in Yogyakarta	Islamic University of Indonesia	23.000.000	23.000.000	3,15%
Total			729.591.460	729.591.460	100,00%

**Project Fund Management
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
January - December 2019**



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Laporan Tahunan

2020

1 Januari - 31 Desember 2020

January 1 - December 31, 2020

2020

Annual Report

PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA



The advocacy selected and outlined in the policy brief in 2019 was the establishment and strengthening of the Disability Service Unit in each Correctional Technical Implementing Units. This choice is based on three considerations. First, the establishment of the Disability Service Unit is an assertive mandate from Article 37 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This means, since the establishment of the Disability Service Unit is a mandate from the law, the Ministry of Law and Human Rights as the implementer of the law is obliged to implement it. Second, the establishment of a Disability Service Unit in each Technical Implementing Unit has been responded to by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta by issuing a Circular Letter of the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta number W.14-5351.Pk.01.06.01 of 2019 about the Formation of the Disability Service Unit at the Correctional Technical Implementing Unit in the Special Region of Yogyakarta which urges each Technical Implementing Unit to form a Disability Service Unit. Therefore, efforts to establish and develop a Disability Service Unit will be easier because there has been an understanding with the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta. Third, the existence of a Disability Service Unit in each Technical Implementing Unit will greatly assist and facilitate the fulfillment of the rights of persons with disabilities because the Technical Implementing Unit is in direct contact with the inmates. The second point of the considerations above has been a very strong encouragement in forming and developing the Disability Service Unit because the support from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta plays an important role in regulatory policy, as well as encouraging the political will of each Technical Implementing Unit.

1. Background

A. Accessibility of Correctional Technical Implementing Units for Persons with Disabilities

A. Program Aksesibilitas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan bagi Penyandang Disabilitas

1. Latar Belakang

Pilihan advokasi yang dituangkan dalam naskah *policy brief* pada 2019 adalah pembentukan dan penguatan Unit Layanan Disabilitas di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Pilihan ini didasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan. *Pertama*, pembentukan Unit Layanan Disabilitas merupakan amanat tegas dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Artinya, karena pembentukan Unit Layanan Disabilitas adalah amanat dari undang-undang, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana undang-undang wajib menjalankannya. *Kedua*, pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada setiap Unit Pelaksana Teknis telah direspon oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.14-5351.Pk.01.06.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengimbau agar setiap Unit Pelaksana Teknis membetuk Unit Layanan Disabilitas. Dengan demikian, upaya pembentukan dan pengembangan Unit Layanan Disabilitas menjadi lebih memungkinkan karena telah ada kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketiga*, keberadaan Unit Layanan Disabilitas pada setiap Unit Pelaksana Teknis akan sangat membantu dan memudahkan pemenuhan hak penyandang disabilitas karena Unit Pelaksana Teknis yang bersentuhan langsung dengan warga binaan. Poin kedua dari pertimbangan di atas selama ini menjadi kekuatan dalam membentuk dan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas karena dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berperan penting terhadap kebijakan regulasi, sekaligus mendorong *political will* masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

Unit Layanan Disabilitas telah terbentuk di semua Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Kota Yogyakarta. Semua staf Unit Layanan Disabilitas telah dibekali pemahaman tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan hambatan yang mereka hadapi dalam berinteraksi. Sarana prasarana fisik perlahan sudah mulai direnovasi, sekalipun tidak dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya. Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang sudah melembagakan Unit Layanan Disabilitas pada saat itu. Harapannya, proses tersebut dapat direplikasi ke Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, *pertama*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dituntut untuk mengimplementasikan amanat pembentukan Unit Layanan Disabilitas. *Kedua*, keberhasilan PUSHAM UII dalam melembagakan Unit Layanan Disabilitas di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kota Yogyakarta dapat menjadi contoh pelembagaan Unit Layanan Disabilitas, baik di tingkat nasional maupun regional. PUSHAM UII, dalam program ini, melembagakan Unit Layanan Disabilitas ke tingkat nasional serta melakukan pendampingan terhadap Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk di Yogyakarta.

2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah Aksesibilitas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan bagi Penyandang Disabilitas. Output dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran/Surat Keputusan Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di tingkat nasional;
- b. Modul Pelembagaan dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas;
- c. Video Inspirasi Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas.

3. Deskripsi kegiatan

a. Advokasi Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di Level Nasional

Aktivitas yang dilakukan dalam poin ini yaitu:

The activities carried out at this point are:
 1) Preparation of an academic paper "Institutionalization of the Disability Service Unit in the Correctional Technical Implementation Unit" which contains:

a. Advocacy for Institutionalization of Disability Service Units at the National Level

3. Description of Activities

- a. Circular/Decree on Institutionalization of Disability Service Units at the national level;
 - b. Module of Institutionalization and Development of Disability Service Units;
 - c. Inspirational Video for Institutionalization of Disability Service Units.
- The expected change from this program is the accessibility of the Correctional Technical Implementation Unit for persons with disabilities. The output of this program is as follows:

2. Outcome and Output

Unit that has been established in Yogyakarta.
 Disability Service Unit at the national level and provides assistance to the Disability Service Unit at the national and regional levels. PUSHAM UII, in this program, institutionalizes the implementation of institutionalizing Disability Service Units, institutionalizing Disability Service Units in all Yogyakarta Correctional Technical Units. Second, the success of PUSHAM UII in establishing the Disability Service Unit. In particular the Directorate General of Corrections, is required to implement the mandate of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in
 Therefore, first, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in
 Correctional Technical Implementing Units in Indonesia.

Disability Service Units have been formed in all Correctional Technical Implementation Units in Yogyakarta City. All staff of the Disability Service Unit has been provided with an understanding of how to interact with persons with disabilities and the barriers they face in interacting. Physical facilities are slowly starting to be renovated, although not completely done due to limited resources. Yogyakarta was the only province that had institutionalized a Disability Service Unit at that time. It is hoped that this process can be replicated to other

all Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights and Correctional Institutionalization of the Disability Service Unit. It is hoped that with this module contains guidance on how to implement the Circular on Development of the Disability Service Unit Institutionalization Module. This namely:

b. Availability of Campaign Tools for Institutionalization of Disability Service Units in each Correctional Technical Implementing Unit

The Disability Service Unit Institutionalization Campaign Tool consists of two points, Discussion was conducted via Zoom twice.

Human Rights in the process of making Circulars/Decrees. This Focus Group participants from the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and May to June 2020 to conduct Focus Group Discussion activities, inviting the Ministry of Law and Human Rights, and one consultant. The team worked from PUSHAM UII and two representatives of the Directorate General of Corrections of Service Unit was carried out by a team consisting of two representatives of the Disability Service Unit on Institutionalization of the Disability Service Unit. The drafting of the Decree or Circular on Institutionalization of the Disability participants and held in May 2020.

3) The drafting of the Decree or Circular on Institutionalization of the Disability participants and held in May 2020.

2) Focus Group Discussion with the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights to form a drafting team and obtain input related to the substance of the Decree or Circular on Institutionalization of the Disability Service Unit. The Focus Group Discussion was held via Zoom, because it was not yet possible to meet in Jakarta. The Focus Group Discussion was attended by 15 participants and held in May 2020.

1) Focus Group Discussion with the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights to form a drafting team and obtain input related to the substance of the Decree or Circular on Institutionalization of the Disability Service Unit. The Focus Group Discussion was held via Zoom, because it was not yet possible to meet in Jakarta. The Focus Group Discussion was attended by 15 participants and held in May 2020.

analysis of the current regulatory framework; and 2) success story of Institutionalization of Disability Service Unit in Yogyakarta. This activity was carried out in Yogyakarta by the PUSHAM UII team. This academic paper serves as an academic foothold for the establishment of the Disability Service Unit at the national level;

- 1) Penyusunan naskah akademik “Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan” yang berisi: 1) gap analisis atas kerangka regulasi yang ada saat ini; dan 2) cerita kesuksesan Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas di Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta oleh tim PUSHAM UII. Naskah akademik ini merupakan pijakan akademis pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada level nasional;
- 2) *Focus Group Discussion* dengan pihak Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membentuk tim perumus dan mendapatkan masukan terkait dengan substansi Surat Keputusan atau Edaran Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas. *Focus Group Discussion* diselenggarakan via Zoom, karena belum memungkinkan untuk bertemu di Jakarta mengingat situasi pandemi Covid-19 yang mengkhawatirkan pada waktu itu. *Focus Group Discussion* diikuti oleh 15 orang peserta dan dilaksanakan pada Mei 2020.
- 3) Drafting Surat Keputusan atau Edaran Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas, dikerjakan oleh satu tim yang terdiri dari: 2 orang perwakilan PUSHAM UII, 2 orang perwakilan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan 1 orang konsultan. Tim bekerja selama Mei hingga Juni 2020 untuk melakukan kegiatan *Focus Group Discussion*, dengan menghadirkan peserta dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pembuatan Surat Edaran/Surat Keputusan. *Focus Group Discussion* ini dilakukan via Zoom sebanyak dua kali.

b. Tersedianya Alat Kampanye Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas pada Setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

Alat kampanye Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas terdiri dari dua poin, yaitu:

- 1) Penulisan Modul Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas. Modul ini berisi panduan bagaimana melaksanakan Surat Edaran Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas. Harapannya, dengan modul ini, seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dapat secara mandiri membentuk dan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas di masing-masing institusinya. Modul ini setidaknya berisi penjelasan mengenai apa itu Unit Layanan Disabilitas, bagaimana membentuk Unit Layanan Disabilitas, apa tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas, standar pengetahuan staf Unit Layanan Disabilitas, hingga desain universal sarana dan prasana fisik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sumber pembuatan modul adalah hasil penelitian PUSHAM UII, Center for Detention Studies, dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel di Lembaga Pemasarakatan pada 2018. Modul dikerjakan oleh dua orang, selama Juli dan Agustus 2020.

- 2) Pembuatan Video. Skrip video diturunkan dari modul yang sudah dibuat, sehingga akan lebih memudahkan pengguna dalam memahami aksesibilitas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan bagi penyandang disabilitas. Video dikerjakan oleh dua orang, pada bulan Agustus 2020.

c. Pendampingan Unit Layanan Disabilitas di Kota Yogyakarta

Pada 2019 lalu, PUSHAM UII telah melembagakan dan melakukan penguatan Unit Layanan Disabilitas di enam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang ada di Kota Yogyakarta. Keenam Unit Pelaksana Teknis tersebut yaitu: Balai Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Perempuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Pemasarakatan Narkotika. Saat ini, Unit Layanan Disabilitas sudah berjalan di masing-masing Unit Pelaksana Teknis. Namun demikian, masih dibutuhkan pendampingan sekaligus evaluasi terhadap Unit Layanan Disabilitas yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, 2 kali pertemuan dilakukan, yang diikuti oleh 30 orang termasuk peserta, fasilitator, maupun narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir September dan Oktober 2020.

4. Hasil

- a. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-18.HH.01.04 Tahun

4. Results

- a. Circular Letter of the Directorate General of Corrections Number PAS-18.HH.01.04 of

carried out at the end of September and October 2020.

including participants, facilitators, and resource persons. This activity has been still needed. Therefore, two meetings were held, which was attended by 30 people assistance as well as evaluation of the Disability Service Unit that has been formed is has been running in each Correctional Technical Implementation Unit. However, Correctional Center and the Detention Center. Currently, the Disability Service Unit, Women, Narcotics Correctional Institution, Correctional Institutions for Child, implementing units are: Correctional Institutions, Correctional Institution for Unit in six Technical Implementation Units in the City of Yogyakarta. The six technical in 2019, PUSHAM UII has institutionalized and strengthened the Disability Service

c. Assistance for Disability Service Units in the City of Yogyakarta

August 2020.

Technical Implementing Units for people with disabilities. The video was made in that it will be easier for users to understand the accessibility of Correctional 2) Video making. The video script is derived from a module that has been created, so Institutions 2018. The module was written by two people, during July and August Studies, and the Inclusion and Advocacy Center for Disabilities at Correctional making the module is the research result of PUSHAM UII, the Center for Detention physical facilities and infrastructure for persons with disabilities. The source for standards of Disability Service Unit staff, to the universal design of accessible Unit, what are the duties and functions of a Disability Service Unit, knowledge explanation of what a Disability Service Unit is, how to form a Disability Service Service Units in their respective institutions. This module at least contains an Technical Implementing Units can independently establish and develop Disability



6. Proof of Activities

Partners in this activity are the Inclusion Center and the Difabel Advocacy Movement, Indonesian Sign Language Interpreters, and SABDA, while the beneficiary institutions are the Directorate General of Corrections. This program was held in collaboration with PUSHAM UII with The Asia Foundation and with the support of the Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

5. Collaborations

- a. Technical Implementing Unit.
 - b. Module for Institutionalization and Development of Disability Service Units;
 - c. Inspirational Video for Institutionalization of Disability Service Units.
- 2020 concerning the Establishment of a Disability Service Unit at the Correctional

2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

- b. Modul Pelembagaan dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas;
- c. Video Inspirasi Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas.

5. Kerja Sama

Mitra dalam kegiatan ini adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, Juru Bahasa Isyarat Indonesia, dan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA). Lembaga penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Program ini terselenggara atas kerjasama PUSHAM UII dengan The Asia Foundation dan atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2.

6. Bukti Kegiatan



B. Penelitian tentang Peta Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia dalam Praktik Peradilan di Indonesia

1. Latar Belakang

Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang menjadi pekerjaan bagi para pemikir dan aktifis hak asasi manusia yaitu setelah lebih dari dua puluh tahun reformasi yang ditandai salah satunya dengan diakomodasinya Pasal 28 UUD NRI 1945, apakah hak asasi manusia telah menjadi bagian dari pertimbangan hukum hakim saat memutus perkara? Pertanyaan lainnya adalah bagaimana para hakim menerapkan hak asasi manusia dalam putusan?

Di sisi lain, ditemukan beberapa putusan yang mendapatkan perhatian publik dan menjadi contoh baik tentang bagaimana hak asasi manusia menjadi pertimbangan hakim dalam putusan serta berpengaruh pada kualitas putusan yang mereka ambil. Pertanyaan tersebut dijawab dengan melakukan penelitian terhadap putusan peradilan di Indonesia.

2. Outcome dan Output

Luaran penelitian ini adalah laporan penelitian yang berjudul “Human Rights Judicial Methodology: A Map on Indonesian Practices.”

3. Deskripsi Kegiatan

Penelitian ini diawali dengan dua kegiatan, yaitu workshop dan penelitian. Workshop dilakukan dengan menghadirkan Adrian Bedner dari Universitas Leiden, Belanda; Knut D. Asplun dan Aksel Tomte dari NCHR Norwegian Centre for Human Rights; Sidharta dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta; Susi Dwi Harijanti dari Universitas Padjajaran, Bandung; Astriani dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan; Widodo Dwi Putro dari Universitas Mataram; Herlambang Perdana Wiratraman dari Universitas Airlangga; Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; dan tim PUSHAM UII yaitu Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Sahid Hadi, dan Despan Heryansyah. Workshop ini dilakukan pada 22 April

2020.

B. Research on the Methodology Map of Human Rights Law in Judicial

Practice in Indonesia

1. Background

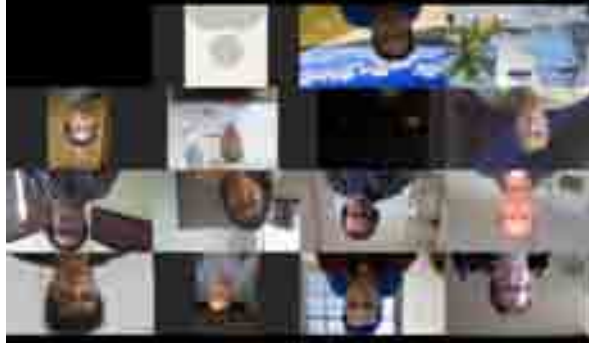
There are important questions for human rights thinkers and activists, that is, after more than twenty years of reform which was marked by the accommodation of Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, have human rights become part of the judge's legal considerations when deciding cases? Another question is how do judges apply human rights in their decisions? On the other hand, several decisions were found that received public attention and became good examples of how human rights became considerations for judges in making decisions and influenced the quality of the decisions they took. This question is answered by conducting research on judicial decisions in Indonesia.

2. Outcome and Output

The output of this research is the research report “Human Rights Judicial Methodology: A Map on Indonesian Practices.”

3. Description of Activities

This research was initiated by two activities, namely, workshops and research. The workshop was conducted by inviting Adrian Bedner from Leiden University, The Netherlands; Knut D. Asplund and Aksel Tomte from Norwegian Centre for Human Rights, Norway; Sidharta from Bina Nusantara University, Jakarta; Susi Dwi Harijanti from Padjajaran University, Bandung; Astriani from Lelp, Widodo Dwi Putro from the University of Mataram; Herlambang Perdana Wiratraman from Airlangga University; Asfinawati from the Indonesian Legal Aid Foundation; and the team from PUSHAM UII, i.e. Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Sahid Hadi, and Despan Heryansyah. This workshop was held



5. Proof of Activities

This activity is a collaboration between PUSHAM UII and the Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo, Norway

4. Collaborations

The study found that there are six models of implementing human rights in decisions, namely (1) decisions that use norms and have human rights arguments, (2) decisions that use norms and have human rights arguments, but the arguments are wrong, (3) decisions that have human rights arguments, but do not refer to human rights norms, (4) decisions that refer to human rights norms, (5) decisions that do not refer to human rights norms, but do not have human rights arguments, (6) decisions that do not refer to human rights norms, but have erroneous human rights arguments.

Fitria Rosalinda.

on April 22, 2020.

This research was conducted by examining one hundred and nineteen decisions consisting of decisions on the right to life, political rights, freedom of religion and belief, freedom of expression, rights to a clean environment, rights to health, rights to work, and rights to property ownership. The research was conducted by a team from PUSHAM UII consisting of Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'ie, Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza Zubarita, and

Penelitian dilakukan dengan menguji 119 (seratus sembilan belas) putusan yang terdiri dari putusan yang menyangkut hak untuk hidup, hak politik, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, hak atas lingkungan hidup yang bersih, hak atas kesehatan, hak untuk bekerja, dan hak atas kepemilikan properti. Penelitian dilakukan oleh tim PUSHAM UII yang terdiri dari Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'ie, Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza Zubarita, dan Fitria Rosalinda.

Penelitian ini menemukan adanya 6 (enam) model penerapan hak asasi manusia dalam putusan yaitu (1) putusan yang menggunakan norma dan memiliki argumentasi hak asasi manusia, (2) putusan yang menggunakan norma dan memiliki argumentasi hak asasi manusia namun argumentasinya keliru, (3) putusan yang memiliki argumentasi hak asasi manusia tetapi tidak merujuk pada norma hak asasi manusia, (4) putusan yang merujuk norma hak asasi manusia, tetapi tidak memiliki argumentasi hak asasi manusia, (5) putusan yang tidak merujuk norma dan tidak memiliki argumentasi hak asasi manusia, dan (6) putusan yang tidak merujuk norma hak asasi manusia, tetapi memiliki argumentasi hak asasi manusia yang keliru.

4. Kerja Sama

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PUSHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Universitas Oslo, Norwegia.

5. Bukti Kegiatan



C. Program Peradilan Yang Adil (*Fair*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih mengalami hambatan yang cukup serius dalam sistem peradilan. Institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih belum sepenuhnya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan.

Merujuk pada penelitian PUSHAM UII pada 2014 dan 2018, kapasitas aparat penegak hukum, institusi peradilan, serta layanan peradilan termasuk di dalamnya lembaga pemasyarakatan masih belum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Problem peradilan yang belum *fair* kepada penyandang disabilitas memperlihatkan bahwa perlu ada aktivitas besar, sinergis, dan sistematis yang harapannya dapat mendorong perubahan di berbagai lini. Menguatkan kapasitas aparat penegak hukum tentang perspektif disabilitas, mendorong program perwujudan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di peradilan, dan mendorong pemahaman penegak hukum tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta bagaimana merumuskannya dalam dokumen hukum yang lebih operasional menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh semua kalangan.

Situasi di atas melatarbelakangi PUSHAM UII untuk terlibat dalam agenda reformasi peradilan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) untuk merealisasikan kewajiban negara pada hak atas peradilan yang *fair* yang salah satunya berupa keharusan untuk menyediakan sarana prasarana yang aksesibel dan akomodasi layak. Dalam konteks ini, aktivitas penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum sendiri sudah menjadi fokus utama PUSHAM UII sejak lama.

2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah institusi peradilan menerapkan prinsip-

2. Outcome and Output

Disabilities and how to formulate it in a more operational legal document, are very important to be done by all people. This is the background behind PUSHAM UII to be involved in the judicial reform agenda by strengthening the capacity of law enforcement officers (police, prosecutors and judges) to fulfill the right to a fair trial, one of which is the obligation to provide accessible infrastructure and adequate accommodation. In this context, capacity building activities for law enforcement officers have been the main focus of PUSHAM UII for a long time. Referring to the PUSHAM UII research in 2014 and 2018, the capacity of law enforcement officers, judicial institutions, and judicial services including correctional institutions still does not fulfill the rights of persons with disabilities. The judiciary that has not been fair to persons with disabilities shows that large, synergistic and systematic activities are needed which are expected to encourage changes in various lines. Strengthening the capacity of law enforcement officers on disability perspectives, encouraging the creation of programs so that accessibility and proper accommodation in the judiciary can be achieved, as well as encouraging law enforcers' understanding of the Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and how to formulate it in a more operational legal document, are very important to be done by all people.

Persons with disabilities who are in conflict with the law still experience serious obstacles in the justice system. The institutions of the police, prosecutors, and courts still do not fully fulfill the rights of persons with disabilities. In this case, the right to a fair trial for persons with disabilities is still an unfinished business.

C. Fair Trial for Persons with Disabilities

Activities in this program are as follows:

- Need Assessment on the substance of the training conducted in October 2020. This activity was carried out to ensure that the modules made by PUSHAM UII were in accordance with the need to increase the capacity of judges, prosecutors, and police as law enforcers. In practice, the need assessment report is used to create modules and reading materials. This activity was carried out in collaboration with the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Training Center - the Supreme Court.
- Development of the training module during December 2020. The training module development team consisted of PUSHAM UII team, representatives from the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court.

3. Description of Activities

The output of this program is as follows:

- Authorized training module for Judges, Prosecutors, and Police to conduct a fair judicial process for persons with disabilities;
- a package of reading materials/training materials for judges, prosecutors, and the police on the implementation of a fair judicial process and adequate accommodation;
- availability of instructors/trainers on the implementation of a fair judicial process and adequate accommodation for persons with disabilities at Education and Training Centers/Agencies of the Supreme Court, Attorney General's Office, and the Police;
- A number of Judges, Prosecutors and Police who have specific knowledge to conduct a fair judicial process and adequate accommodation for persons with disabilities.

prinsip yang adil (*fair*) bagi penyandang disabilitas dan program kegiatan peningkatan kapasitas dan referensi yang berkualitas bagi polisi, jaksa, dan hakim tersedia untuk mewujudkan peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- modul pelatihan resmi bagi Hakim, Jaksa, dan Polisi untuk menyelenggarakan proses peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas;
- paket bahan bacaan/materi pelatihan bagi hakim, jaksa, dan polisi tentang penyelenggaraan proses peradilan yang *fair* dan akomodasi yang layak;
- tersedianya pengajar/*trainer* pelatihan tentang penyelenggaraan proses peradilan yang *fair* dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan/Instansi Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian;
- tersedianya sejumlah Hakim, Jaksa, dan Polisi yang memiliki pengetahuan spesifik untuk menyelenggarakan proses peradilan yang *fair* dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

3. Deskripsi kegiatan

Aktivitas dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Penilaian kebutuhan substansi pelatihan (*need assessment*) yang dilakukan pada Oktober 2020. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa modul yang disusun oleh PUSHAM UII sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas hakim, jaksa, dan polisi sebagai penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, laporan *need assessment* digunakan untuk menyusun modul dan bahan bacaan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusediklat Mahkamah Agung RI.
- Penyusunan modul pelatihan yang berlangsung selama Desember 2020. Tim penyusun modul pelatihan terdiri dari tim PUSHAM UII, delegasi Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusediklat Mahkamah Agung RI, perwakilan

- dari komunitas penyandang disabilitas, pendamping hukum disabilitas, dan pegiat isu disabilitas dari kalangan akademisi menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing modul (modul untuk kepolisian, modul untuk kejaksaan, dan modul untuk pengadilan)
- c. Audiensi dengan pimpinan Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI pada Desember 2020. Kegiatan ini dilakukan utamanya untuk meminta ketersediaan penulis modul dan bahan bacaan dari internal institusi, serta untuk membahas program lanjutan berupa training penguatan kapasitas peradilan yang fair dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
 - d. Penyusunan bahan bacaan pelatihan pada Januari 2021. Bahan bacaan terdiri dari bahan bacaan untuk pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Tim penulis bahan bacaan terdiri dari tim PUSHAM UII, delegasi Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas, pendamping hukum disabilitas, dan pegiat isu disabilitas dari kalangan akademisi. Dalam prosesnya, bahan bacaan juga melewati proses *review* yang dilakukan oleh tim *expert* untuk isu disabilitas dan tim yang mewakili Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, serta program PUSHAM UII. Setelah proses *review*, proses yang dilakukan adalah melalui diskusi untuk memperbaiki penulisan, editing, dan layout.
 - e. Penyerahan modul dan bahan bacaan ke Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung, dan mendiskusikan kepesertaan, kepanitiaan, dan rencana *training piloting* yang diisi oleh para peserta *Training of Trainers*.
 - f. *Trainers Convention* pada April 2021. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang model fasilitasi, pertanyaan kunci materi pelatihan, dan skenario studi kasus yang untuk didiskusikan oleh para peserta.
 - g. *Training of Trainers* (TOT) Mahkamah Agung pada Mei 2021, Kejaksaan Agung RI pada Juni 2021, dan Kepolisian pada September 2021. Fasilitator diisi oleh para penulis

- academia to adjust the needs of each module (module for police, module for prosecutors, and module for court).
- c. Dialogue with the leadership from the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Center in Attorney General's Office, and the Education and Training Center in the Supreme Court in December 2020. This activity was carried out mainly to request the availability of module writers and reading materials from internal institutions, as well as to discuss further programs in the form of training to strengthen the capacity of a fair judiciary and adequate accommodation for persons with disabilities.
 - d. Preparation of training reading materials in January 2021. Reading materials consist of reading materials for courts, prosecutors, and for the police. The reading material writing team consisted of PUSHAM UII team, delegates from the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court, representatives from the disabled community, disability legal assistants, and disability issue activists from academia. In the process, reading materials also go through a review process conducted by a team of disability experts and a team representing from the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency, the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court, and PUSHAM UII. After the review, the next process is improvements in writing, editing, and layouts.
 - e. Handling over modules and reading materials to the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court in March 2021 as well as discussing participation, committees, and piloting training plans which will later be carried out by the participants of the Training of Trainers.

the Education and Training Center - the Supreme Court.

Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and encourage the development of curriculum, syllabus and teaching evaluation methods to make rules within the internal judiciary, one of which is the police, as well as activities the law has an impact on advocacy work that is quite good, i.e. there is encouragement to obtaining judges, prosecutors and police who have knowledge of disability in dealing with activity were used as a reference for the participants. In addition, further progress after Supreme Court. Modules and reading materials which were the previous outputs in this Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training participants in the Training of Trainers from the Investigation Education and Training participants from the Yogyakarta and Central Java areas. This activity empowered times, each for the Police, the Attorney General's Office, and the Supreme Court with December 2021 and the Police in December 2021. This activity was carried out three h. Piloting Training for the Supreme Court in October 2021, the Attorney General's Office in disability legal counsel and academics with knowledge of disability issues.

Training Center - the Supreme Court, representatives of persons with disabilities, Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and are the module writers consisting of the team from PUSHAM UII, the Investigation General's Office in June 2021, and at the Police in September 2021. Acting as facilitators g. Training of Trainers at the Supreme Court in May 2021, at the Indonesian Attorney be discussed by the participants.

f. Trainers Convention in April 2021. This activity was carried out to reach agreement on the facilitation model, key questions on training materials, and case study scenarios which will

modul yang terdiri dari tim PUSHAM UII, delegasi Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, perwakilan penyandang disabilitas, pendamping hukum disabilitas, dan akademisi yang memiliki pengetahuan tentang topik disabilitas.

- h. *Training Piloting* Mahkamah Agung pada Oktober 2021, Kejaksaan pada Desember 2021, dan Kepolisian pada Desember 2021. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali, masing-masing untuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dengan peserta yang berasal dari area Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kegiatan ini memberdayakan peserta TOT dari Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Modul dan bahan bacaan yang menjadi output sebelumnya digunakan sebagai rujukan para peserta. Selain itu, progres lanjutan setelah adanya Hakim, Jaksa, dan Polisi yang memiliki pengetahuan tentang disabilitas berhadapan dengan hukum berdampak pada kerja-kerja advokasi yang cukup baik, yaitu adanya dorongan untuk membuat aturan di internal institusi peradilan, salah satunya di institusi kepolisian, serta aktivitas untuk mendorong pembuatan kurikulum, silabi, dan metode evaluasi pengajaran di institusi Peradilan Mahkamah Agung, Badiklat Kejaksaan Agung, dan Diklat Reserse Lemdiklat Polri.

4. Hasil

Hasil langsung dari kegiatan ini adalah: *pertama*, mitra memiliki pengetahuan yang meningkat terhadap masalah dan cara mengatasinya. Pengetahuan tersebut terlihat dari bagaimana cara mitra memberikan atensi untuk institusi masing-masing agar kedepan menyediakan penerjemah bahasa isyarat, atensi untuk membuat ramp dan sarana prasarana yang layak lainnya bagi penyandang disabilitas, dan atensi untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik yang mereka ajar terkait kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Mitra telah memiliki inisiatif-inisiatif untuk membuat kebijakan yang harapannya berkontribusi bagi perluasan pengetahuan tentang penyandang disabilitas

berhadapan dengan hukum.

Kedua, Mitra dalam hal ini juga bekerjasama secara efektif untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan mendukung implementasinya. Efektifitasnya terlihat dari beberapa inisiatif: (1) dukungan pembuatan kebijakan agar membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang mengawal isu disabilitas berhadapan dengan hukum di bidang peradilan. Saat ini, pokja sudah terbentuk di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan yang terakhir akan terbentuk di unit Bareskrim Polri; (2) adanya respon yang sangat positif untuk membuat kebijakan kurikulum, silabi, dan metode evaluasi tentang penguatan kapasitas aparat penegak hukum di institusi mitra Pusdiklat Mahkamah Agung, Badiklat Kejaksaan Agung dan Diklat Reserse Lemdiklat Polri. Respon ini didukung dengan adanya tim yang akan terlibat dalam penyusunan dan implementasinya; dan (3) adanya *political will* untuk menghadirkan organisasi penyandang disabilitas kedepannya agar terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketiga, mitra memiliki peningkatan kapasitas kelembagaan (sistem dan keterampilan) untuk mendukung pengembangan dan implementasi kebijakan yang lebih baik. Mitra telah melakukan upaya-upaya pembuatan kebijakan internal yang sangat membanggakan, diantaranya adalah pelatihan internal Pusdiklat Mahkamah Agung terkait penguatan kapasitas aparat penegak tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang mana substansi dan pematerinya merujuk pada konsep yang digunakan oleh PUSHAM UII; rencana pembuatan laboratorium yang ramah disabilitas di lembaga Diklat Reserse Lemdiklat Polri; pelibatan jaringan Penerjemah Bahasa Isyarat untuk kepentingan peradilan di Mahkamah Konstitusi, adanya dorongan untuk membuat sarana prasarana di Badiklat Kejaksaan Agung aksesibel, serta adanya inisiatif masing-masing lembaga untuk belajar bahasa isyarat dan layanan disabilitas yang tepat.

Keempat, mitra memiliki peningkatan pemahaman mengenai cara mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas. Mitra telah melakukan upaya peningkatan pemahaman terkait disabilitas berhadapan dengan hukum, diantaranya dengan

The direct result of this activity is first, partners have increased knowledge of problems and how to solve them. This knowledge can be seen from how partners pay attention to their respective institutions to provide sign language interpreters in the future, attention to making ramps and other adequate accommodations for people with disabilities, and attention to providing knowledge to the students they teach related to cases of persons with disabilities in dealing with the law. Even partners also have initiatives to make policies that are expected to contribute to the expansion of knowledge about persons with disabilities in conflict with the law.

Second, partners work together effectively to develop better policies and support their implementation. This effectiveness can be seen from several initiatives: (1) support for policy making in order to establish the Working Group that oversees the issue of disability in facing the law. Currently the Working Group has been formed in the Supreme Court, the Attorney General's Office and the last one will be formed in the Criminal Investigation Unit of the Police; (2) there is a very positive response to making policies on curriculum, syllabus and evaluation methods on strengthening the capacity of law enforcement officers in partner institutions, the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court. This response is supported by the creation of a team that will be involved in its preparation and implementation; and (3) there is political will to invite organizations of persons with disabilities in the future to be involved in the policy-making process.

4. Results

program is fully supported by the Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

PUSHAM UII's partners in this program are the Inclusion Center and the Disability Advocacy Movement (SIGAB), the Women, Disability, and Children Advocacy Center (SAPDA), the Rifka Annisa Women's Crisis Center, and the Mental Health Association (PJS). While the beneficiaries of this program are from the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court. This

5. Collaborations

laboratory/study place.

PUSHAM UII, a plan to create a disability-friendly laboratory at the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court which will create a disability-friendly holding internal activities in the form of training related to disability in conflict with the law organized by the Education and Training Center - the Supreme Court, as well as activities to promote the protection of the rights of persons with disabilities declared by the Heads of the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court. Partners have made efforts to increase understanding related to disability in dealing with the law, including an interest in learning sign language as expressed in the group of judges who are members of the training group, and appropriate disability services.

PUSHAM UII, a plan to create a disability-friendly laboratory at the Investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency; the involvement of Sign Language Translators network for judicial purposes at the Constitutional Court, the encouragement to create accessible infrastructures at the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, as well as the initiative of each institution to learn sign language

adanya ketertarikan untuk belajar bahasa isyarat sebagaimana diungkap dalam kelompok para hakim yang tergabung dalam group pelatihan, mengadakan kegiatan internal berupa pelatihan terkait disabilitas berhadapan dengan hukum yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung, serta aktivitas promosi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang dikemukakan oleh Pimpinan lembaga Badiklat Kejaksaan Agung, Pimpinan Pusdiklat Mahkamah Agung, serta Diklat Reserse Lemdiklat Polri akan membuat laboratorium/tempat belajar yang ramah disabilitas.

5. Kerja Sama

Mitra kerjasama PUSHAM UII dalam program ini adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA), Rifka Annisa Women's Crisis Center, dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS). Penerima manfaat dari program ini adalah Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan Agung RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Program ini seluruhnya didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice 2.

6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities

PUSHAM UII

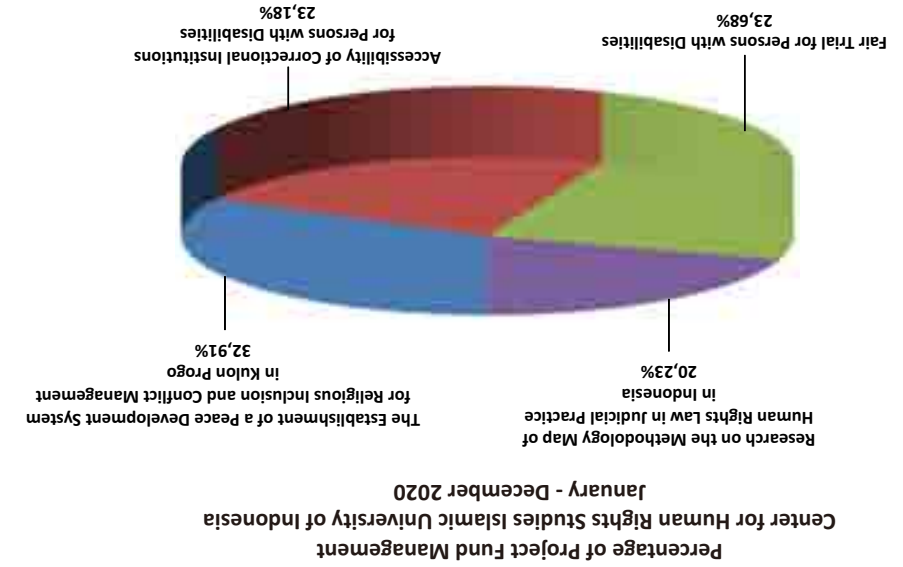
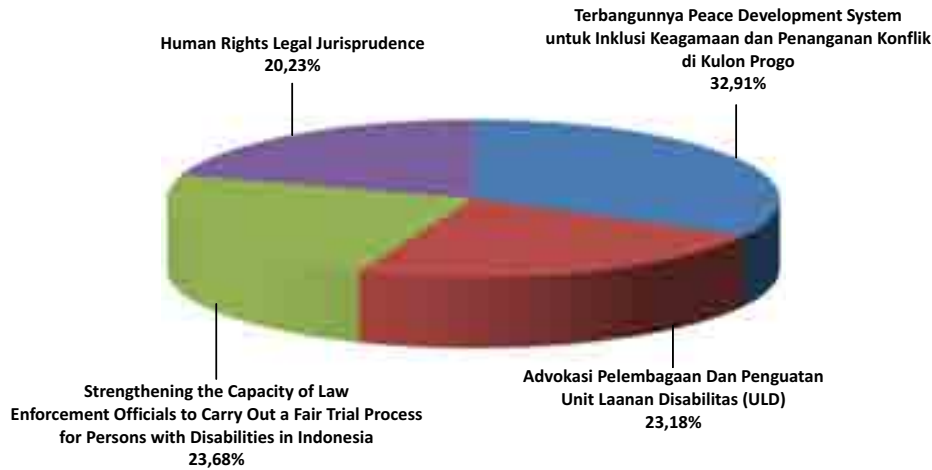


Laporan Keuangan

Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Januari - Desember 2020

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Terbangunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	416.878.140	32,91%	Januari - Desember 2020
2.	Advokasi Pelembagaan Dan Penguatan Unit Laanan Disabilitas (ULD)	The Asia Foundation & AIPJ 2	293.676.640	23,18%	Juni - Desember 2020
3.	Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials to Carry Out a Fair Trial Process for Persons with Disabilities in Indonesia	AIPJ 2	300.000.000	23,68%	September - Desember 2020
4.	Human Rights Legal Jurisprudence	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	256.272.000	20,23%	April - Desember 2020
TOTAL			1.266.826.780	100,00%	

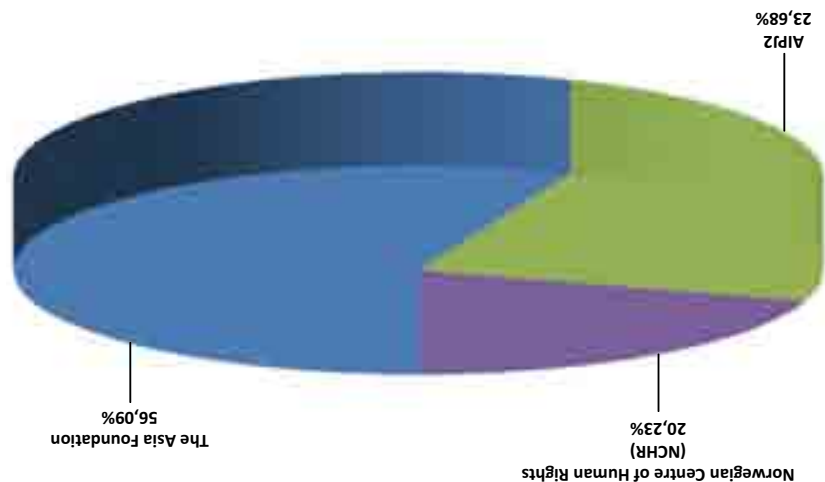
Prosentase Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Januari - Desember 2020



No.	Project	Donor Agency	Amount (Rp)	% ase	Period
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	416.878.140	32,91%	Januari - Desember 2020
2.	Accessibility of Correctional Institutions for Persons with Disabilities	The Asia Foundation & AIPJ 2	293.676.640	23,18%	Juni - Desember 2020
3.	Fair Trial for Persons with Disabilities	AIPJ 2	300.000.000	23,68%	September - Desember 2020
4.	Research on the Methodology Map of Human Rights Law in Judicial Practice in Indonesia	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	256.272.000	20,23%	April - Desember 2020
TOTAL			1.266.826.780	100,00%	

Project Fund Management Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia January - December 2020

Financial Statement



Percentage of Project Fund Management
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
January - December 2020

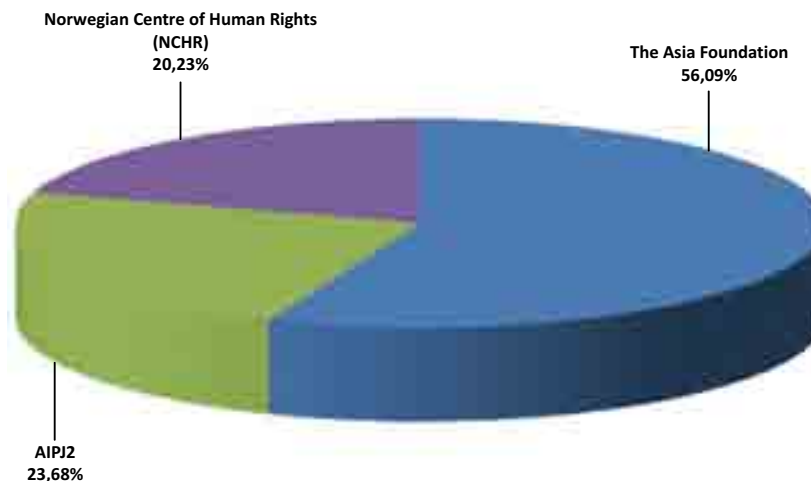
No.	Project Title	Donor Agency	Amount (Rp)	Sub Total	% age
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	416.878.140	710.554.780	56,09%
			293.676.640		
2.	Fair Trial for Persons with Disabilities	AIPJ 2	300.000.000		23,68%
3.	Research on the Methodology Map of Human Rights Law in Judicial Practice in Indonesia	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	256.272.000		20,23%
Total			1.266.826.780	1.266.826.780	100,00%

Project Fund Management
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
January - December 2020

Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Januari - Desember 2020

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Terbanggunya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	416.878.140	710.554.780	56,09%
	Advokasi Pelembagaan Dan Penguatan Unit Laanan Disabilitas (ULD)		293.676.640		
2.	Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials to Carry Out a Fair Trial Process for Persons with Disabilities in Indonesia	AIPJ 2	300.000.000	300.000.000	23,68%
3.	Human Rights Legal Jurisprudence	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	256.272.000	256.272.000	20,23%
Total			1.266.826.780	1.266.826.780	100,00%

Prosentase Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Januari - Desember 2020





PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Laporan Tahunan

2021

1 Januari - 31 Desember 2021

January 1 - December 31, 2021

2021

Annual Report

PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA



The success of the institutionalization of the Disability Service Unit in Yogyakarta and policy advocacy at the national level requires further modalities to deliver this good practice for the goal of inclusive correctional facilities. In this case, even though the Directorate General of Corrections has legalized Circular Letter Number PAS-18.HH.01.04 of 2020 concerning the Establishment of Disability Service Units in Correctional Technical Implementing Units throughout Indonesia has been supported by a handbook for the establishment of the Disability Service Unit and a video tutorial on the institutionalization of the Disability Service Unit, PUSHAM UII realizes that the substance of the institutionalization of the Disability Service Unit needs to be implemented strategically and needs to be mainstreamed with various efforts. Therefore, in 2021, PUSHAM UII has focused on three efforts in order to encourage inclusiveness in correctional facilities. First, PUSHAM UII encouraged the update of the Correctional Database System to have the Disability Service Unit feature. This effort was chosen because when the program was started, the Directorate General of Corrections had serious challenges in accurately registering persons with disabilities in correctional facilities.

1. Background

A. Correctional Database System Development with Disability Service Unit Features

A. Pengembangan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dengan Fitur Unit Layanan Disabilitas

1. Latar Belakang

Keberhasilan pelebagaan Unit Layanan Disabilitas di Yogyakarta dan advokasi kebijakan di level nasional mensyaratkan modalitas lanjutan untuk mengantarkan praktik baik ini ke cita-cita pemsarakatan yang inklusif. Walau Direktorat Jenderal Pemsarakatan telah mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan di seluruh Indonesia (SE) dan SE tersebut telah didukung dengan sebuah buku pedoman pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan video tutorial pelebagaan Unit Layanan Disabilitas, PUSHAM UII menyadari bahwa substansi dari pelebagaan Unit Layanan Disabilitas perlu diimplementasikan secara strategis dan di-*mainstreaming*-kan dengan pelbagai upaya. Karenanya, pada 2021, PUSHAM UII berfokus pada tiga upaya dalam rangka mendorong inklusivitas pemsarakatan. *Pertama*, PUSHAM UII mendorong pemutakhiran Sistem Database Pemsarakatan (SDP) untuk memiliki fitur Unit Layanan Disabilitas. Upaya ini dipilih karena saat ini (red: saat program ini dimulai), Direktorat Jenderal Pemsarakatan memiliki tantangan serius dalam mendata penyandang disabilitas di pemsarakatan secara akurat.

Akibatnya, Direktorat Jenderal Pemsaraktan tidak memiliki data yang memadai terkait keberadaan penyandang disabilitas di pemsarakatan. *Kedua*, PUSHAM UII me-*mainstreaming*-kan substansi SE Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas. Upaya ini dipilih karena Pelebagaan Unit Layanan Disabilitas mensyaratkan *upgrading* pengetahuan-pengetahuan spesifik terutama terkait isu disabilitas dan hak asasi manusia, khususnya bagi petugas Unit Layanan Disabilitas di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan. *Ketiga*, PUSHAM UII mendorong ketersediaan peraturan-peraturan teknis lain yang dapat digunakan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak di pemsarakatan. Upaya ini dipilih karena disadari bahwa ragam disabilitas tertentu, ragam

mental dan intelektual misalnya, memerlukan standar layanan dan perlakuan yang benar-benar spesifik. Inilah situasi makro yang melatari inisiatif PUSHAM UII untuk keberlanjutan program “Aksesibilitas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan bagi Penyandang Disabilitas” pada 2021.

2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah Inklusivitas Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan Indikator Disabilitas pada Sistem Database Pemasarakatan; dan
- b. Peningkatan Kapasitas Staf Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;

3. Deskripsi kegiatan

a. Pembentukan Surat Keputusan Tim Penyusun Fitur Unit Layanan Disabilitas

Pembentukan tim melalui SK Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi Tim IT dan Tim Perubahan Instrumen Pendataan Disabilitas. Tim IT bekerjasama langsung dengan The Asia Foundation sedangkan Tim Perubahan Instrumen dikelola oleh PUSHAM UII. Tim ini terdiri dari 4 orang yang bekerja selama dua bulan yaitu Juni dan Juli. Kerja tim adalah merumuskan indikator yang tepat untuk digunakan dalam mendata penyandang disabilitas agar semua ragam disabilitas dapat terangkum. Tim melakukan *Focus Group Discussion* sebanyak 2 kali dengan menghadirkan perwakilan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendiskusikan draf.

b. Focus Group Discussion dan Koordinasi Tim IT – WATKES – TIKERS – PUSHAM UII

Diskusi ini diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom, menghadirkan 20 orang peserta dan 1 orang fasilitator. Diskusi membahas segala persiapan penyusunan instrumen perubahan pendataan disabilitas, mulai dari timeline, kerangka kerja, dan

Cooperation and PUSHAM UII
of Health Care and Rehabilitation, Directorate of Information Technology and
b. Focus Group Discussion between the Information and Technology Team, Directorate

at the Ministry of Law and Human Rights to discuss the draft.
 conducted twice by inviting representatives of the Directorate General of Corrections
 disabilities can be covered. The team conducted a Focus Group Discussion which was
 indicators to be used in registering persons with disabilities so that all types of
 four people who work in June and July. The task of this team is to make the right
 while the Instrument Change Team is managed by PUSHAM UII. This team consists of
 The Information Technology Team collaborates directly with The Asia Foundation
 Technology Team and the Team for Changes in Disability Data Collection Instruments.
 Corrections, Ministry of Law and Human Rights, which includes the Information and
 Formation of a team through a Letter of Appointment by the Directorate General of

Development Team
a. Preparation of the Appointment Letter for Disability Service Unit Feature

3. Description of Activities
 Implementation Unit
 b. Capacity Building for Disability Service Unit Staff at the Correctional Technical
 a. Improvement of Disability Indicators in the Correctional Database System; and
 Technical Implementing Unit. The output of this program is as follows:
 The expected change from this program is the inclusiveness of services in the Correctional

2. Outcome and Output
 program in 2021.

the “Accessibility of Correctional Technical Implementing Unit for Persons with Disabilities”
 standards. This macro situation underlies the PUSHAM UII initiative for the continuation of
 example mental and intellectual disabilities, require very specific service and treatment

agreement on activity outcomes, and also preparing a function test.

This activity was carried out to present the data collection instrument for persons with disabilities through the Correctional Database System. In addition, this discussion was also conducted to obtain input from other parties in the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights and organizations of persons with disabilities. The Focus Group Discussion was attended by 20 participants with two facilitators. The Focus Group Discussion was held in August 2021 online. The discussion includes presentation on field findings, obtaining input and suggestions, finalizing the

e. Focus Group Discussion

This activity is to process data on field findings and make recommendations that can be used as a model for data collection on disability. The workshop was attended by 20 participants and one facilitator in July 2021.

d. Field Findings Data Processing Workshop

Field data collection is needed to obtain an initial description of data collection on persons with disabilities in several Correctional Technical Implementing Units that are the location of research and data collection models at the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights. Field data collection was carried out by the team of Disability Data Collection Instruments Changes. The locations of data collection is at the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, three Technical Implementation Units in Jakarta and three Technical Implementation Units in Yogyakarta.

c. Field Data Collection

This discussion was held online through the Zoom application, inviting 20 participants and one facilitator. The discussion discussed all preparations for making instruments for changes in disability data collection, starting from the timeline, framework, and field data collection instruments. This activity is in June 2021.

instrumen pengambilan data lapangan. Kegiatan ini dilakukan pada Juni 2021.

c. Pengambilan Data Lapangan

Pengambilan data lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran awal pendataan penyandang disabilitas pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang menjadi lokasi penelitian dan model pendataan di Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengambilan data lapangan dilakukan oleh tim Perubahan Instrumen Pendataan Disabilitas. Lokasi pengambilan data adalah di Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3 Unit Pelaksana Teknis di Jakarta dan 3 Unit Pelaksana Teknis di Yogyakarta.

d. Workshop Pengolahan Data Temuan Lapangan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengolah data temuan lapangan serta merumuskan rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai model pendataan disabilitas. Workshop diikuti oleh 20 orang peserta dan 1 orang fasilitator pada Juli 2021.

e. Focus Group Discussion Hasil

Kegiatan ini dilakukan untuk mempresentasikan instrumen pendataan penyandang disabilitas melalui SDP. Selain itu, *Focus Group Discussion* ini juga dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan dari pihak lain di Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan organisasi penyandang disabilitas. *Focus Group Discussion* diikuti oleh 20 peserta dengan 2 fasilitator. *Focus Group Discussion* diselenggarakan pada Agustus 2021 secara online. Detil bahasannya meliputi: pemaparan dan pembahasan hasil temuan lapangan, diskusi untuk mendapatkan masukan dan saran, finalisasi kesepakatan outcome kegiatan, dan persiapan Uji Fungsi

f. Uji Fungsi

Setelah instrumen pendataan disepakati, dilakukan uji fungsi pada masing-masing 3 Unit Pelaksana Teknis di Yogyakarta dan Jakarta. Uji fungsi ini dilakukan untuk melihat

berbagai kemungkinan-kemungkinan dan masukan terhadap sistem yang difungsikan secara nasional. Berikutnya dilakukan penyempurnaan data disabilitas pada SDP.

g. Legalisasi dan Launching

Kegiatan Launching “Sistem Pendataan Nasional Terpadu Tahanan dan WBP Penyandang Disabilitas” diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 2021. Kegiatan ini menghadirkan seluruh Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia dan perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan serta organisasi penyandang disabilitas secara online. Jumlah pesertanya adalah 50 orang dengan dua orang fasilitator.

h. Pembentukan Tim Konsultan Percepatan Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas

SE dan Pedoman Pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan terimplementasi dengan baik jika tidak dikawal. Oleh karena itu, PUSHAM UII bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membentuk tim Konsultan Percepatan Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di seluruh Indonesia. Kerja Tim adalah membantu PUSHAM UII dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan di Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan membantu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang kesulitan dalam melembagakan Unit Layanan Disabilitas. Tim terdiri dari 3 (tiga) orang dan bekerja selama 6 (enam) bulan dari Juni-November 2021 dengan SK dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (atau Direktur). Pelatihan ini berisi berbagai materi tentang disabilitas dan pendalaman SE serta Pedoman Pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Pelatihan diselenggarakan pada Juni 2021 dengan 3 (tiga) peserta, 1 (satu) fasilitator, dan 1 (satu) pembicara.

i. Sosialisasi Surat Edaran, Pedoman, dan Video Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Kegiatan ini diselenggarakan pada Februari 2021, dengan bekerjasama dengan

the Establishment of a Disability Service Unit. The training will be held in June 2021 materials on disability and learned more about the Circular Letter and Guidelines for Corrections, Ministry of Law and Human Rights. This training contained various June-November 2021 with a Letter of Appointment from the Directorate General of Service Unit. The team consisted of three consultants and worked for six months from Technical Implementing Unit which has difficulty in institutionalizing the Disability Corrections at the Ministry of Law and Human Rights and assisting the Correctional is to assist PUSHAM UII in coordinating various activities at the Directorate General of Institutionalization of Disability Service Units throughout Indonesia. The team's work Ministry of Law and Human Rights formed a consultant team for the Acceleration of PUSHAM UII in collaboration with the Directorate General of Corrections at the Human Rights will not be implemented properly if they are not monitored. Therefore, have been legalized by the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and The Circular Letter and Guidelines for the Establishment of Disability Service Units that the Disability Service Unit

h. Establishment of the Consultant Team for the Acceleration of Institutionalization of

disabilities, online. The number of participants is 50 people with two facilitators. Correctional Technical Implementing Unit and organizations of persons with all Heads of Regional Offices throughout Indonesia and representatives of the inmates with Disabilities” was held in Jakarta in September 2021. This activity invited The launch of the “Integrated National Data Collection System for Prisoners and

g. Legalizing and Launching

Correctional Database System. After the data collection instrument was agreed upon, then a function test was carried out on each of the three Technical Implementation Units in Yogyakarta and Jakarta. This function test is to see various possibilities and inputs to the system that will function nationally. Next, there will be improvements to disability data in the

This program is implemented in collaboration with various parties. Partners of Organizations for Persons with Disabilities in this activity are the Inclusion Center and the Indonesian Disability Advocacy Movement (SIGAB), the Foundation for the Advocacy Center for Women, Disability, and Children (SAPDA), and the Center for Detention Studies. Stakeholders involved in implementing the program are the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This program is collaboration between PUSHAM UII and The Asia Foundation and with the support of the Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

5. Collaborations

- a. Development of the Correctional Database System for data collection features for persons with disabilities;
- b. Capacity building of the Disability Service Unit staff at the Correctional Technical Implementing Unit

4. Results

- i. **Dissemination of Circular Letter, Guidelines, and Video for the Establishment of Disability Service Unit**
This activity was held in February 2021 collaborated with the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights by inviting 34 Heads of Regional Offices throughout Indonesia. There are two speakers and two facilitators, held in February 2021. This activity is important to disseminate the Circular Letter, Guidelines, and Video for the Establishment of a Disability Service Unit, as well as to obtain commitments from all Heads of Regional Offices to form a Disability Service Unit in Correctional Technical Implementing Unit which is under its territory.

with three participants, one facilitator and one speaker.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini menghadirkan 34 Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia. Terdapat 2 (dua) pembicara dan 2 (dua) fasilitator. Kegiatan ini penting diselenggarakan untuk mensosialisasikan Surat Edaran, Pedoman, dan Video Pembentukan Unit Layanan Disabilitas, juga dalam rangka mendapatkan komitmen dari seluruh Kepala Kantor Wilayah untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah teritorialnya.

4. Hasil

- a. Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan dengan fitur pendataan penyandang disabilitas;
- b. Peningkatan kapasitas staf Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

5. Kerja Sama

Program ini dilaksanakan atas kerja sama dengan pelbagai pihak. Mitra OPD dalam kegiatan ini meliputi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), dan Center for Detention Studies. *Stakeholders'* yang terlibat dalam pelaksanaan program adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Program ini terselenggara atas kerjasama PUSHAM UII dengan The Asia Foundation dan atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2.

6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities

Two workshops and a writing process were held to reach agreement on the substance and method of writing the book Jurisprudence on Human Rights Law. First, a workshop on the methodology of human rights law. This activity was attended by six people from PUSHAM UII, namely Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'ie, Suparman Marzuki, Alda Izzati, Sahid Hadi; two people from the NCHR, namely Aksel Tomte and Victoria Skeie; Matthew Saul of Inland Norway University of Applied Sciences; Julie Fraser of Utrecht University; Herlambang P. Wiratraman from the Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law Airlangga University; Shidarta from Bina Nusantara University; Sri Wiyanti Eddyono, Faculty of Law

3. Description of Activities

The output of this program is the outline of the book Jurisprudence on Human Rights Law.

2. Outcome and Output

Judicial process in Indonesia.

Research conducted by PUSHAM UII in 2019 found that human rights law is still placed as international law which has not yet become an integral part of legal practice in the judicial process in Indonesia. Responding to this problem, this year PUSHAM UII started the publication process which intends to offer ideas on how human rights law becomes part of the judicial process in Indonesia. Responding to this problem, this year PUSHAM UII started the publication process which intends to offer ideas on how human rights law becomes part of the

The background of the implementation of this program is related to the important role of courts, judges in particular, in applying human rights standards and norms when adjudicating a case. The current situation in Indonesia is that there are still many court decisions that exclude aspects of human rights, both in the context of criminal, civil, state administration, as well as reviewing laws and regulations in the Supreme Court and the Constitutional Court.

1. Background

B. Development of Concepts and Practices of Human Rights Law Jurisprudence in Indonesia

B. Pengembangan Konsep dan Praktik Jurisprudensi Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Latar Belakang

Latar belakang dari pelaksanaan program ini terkait dengan pentingnya peran pengadilan, hakim khususnya, dalam mengaplikasikan standar dan norma hak asasi manusia ketika mengadili suatu kasus. Situasi terkini di Indonesia adalah bahwa masih banyak putusan pengadilan yang mengucilkan aspek hak asasi manusia, baik dalam konteks pidana, perdata, tata usaha negara, maupun pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh PUSHAM UII pada tahun 2019 menemukan data bahwa hukum hak asasi manusia masih diletakkan sebagai hukum internasional yang belum menjadi bagian integral dari praktik hukum pada proses peradilan di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, tahun ini PUSHAM UII memulai proses publikasi yang bermaksud menawarkan gagasan mengenai bagaimana hukum hak asasi manusia menjadi bagian dari proses peradilan di Indonesia.

2. Outcome dan Output

Luaran program ini adalah outline buku Jurisprudensi Hukum Hak Asasi Manusia.

3. Deskripsi Kegiatan

Dua workshop dan proses penulisan telah diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai substansi dan metode penulisan buku Jurisprudensi Hukum Hak Asasi Manusia. *Pertama*, workshop tentang metodologi hukum hak asasi manusia. Kegiatan ini diikuti oleh 6 (enam) orang dari PUSHAM UII yaitu Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'ie, Suparman Marzuki, Alda Izzati, Sahid Hadi; 2 (dua) orang dari NCHR yaitu Aksel Tomte dan Victoria Skeie; Matthew Saul dari Inland Norway University of Applied Sciences; Julie Fraser dari Utrecht

University; Herlambang P. Wiratraman dari Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law Airlangga University; Shidarta dari Bina Nusantara University; Sri Wiyanti Eddyono, Fakultas Hukum UGM; dan Widodo Dwi Putro dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Workshop ini berhasil merumuskan 7 (tujuh) substansi yang ditulis dalam buku antara lain Fondasi Filosofis, Interpretasi Perjanjian Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Praktik Ajudikasi Hak Asasi Manusia, Institusionalisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia dan Hukum Perdata. Workshop ini dilakukan pada tanggal 24-25 Juni 2021. *Kedua*, penulisan draft naskah buku oleh para penulis. Penulis buku ini adalah Matthew Saul, Julie Fraser, Herlambang P. Wiratraman; Shidarta; Sri Wiyanti Eddyon, dan Widodo Dwi Putro. *Ketiga*, workshop tentang perkembangan naskah buku. Workshop ini dilakukan untuk mencari alternative model dan kesamaan pendekatan dalam penulisan. Workshop dihadiri oleh para penulis dan tim PUSHAM UII dan NCHR. Workshop dilakukan pada tanggal 18 Desember 2021.

4. Kerja Sama

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PUSHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Universitas Oslo, Norwegia.

4. Collaborations
This activity is a collaboration between PUSHAM UII and the Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo, Norway.

UGM, and Widodo Dwi Putro from the Faculty of Law, University of Mataram. This workshop succeeded in formulating seven substances that will be written in the book, including Philosophical Foundations, Interpretation of International Human Rights Law Agreements, Human Rights Adjudication Practices, Institutionalization of Human Rights in Indonesia, Human Rights and Constitutional Law, Human Rights and Criminal Law, Human Rights and Civil Law. This workshop was held on June 24-25, 2021. Second, the writing of a draft of the book by the authors. The authors of this book are Matthew Saul, Julie Fraser, Herlambang P. Wiratraman, Shidarta, Sri Wiyanti Eddyon, and Widodo Dwi Putro. Third, a workshop on the development of book manuscripts. This workshop was conducted to find alternative models and common approaches in writing. The workshop was attended by the authors and the PUSHAM UII and NCHR teams. The workshop will be held on December 18, 2021.



5. Bukti Kegiatan



5. Proof of Activities

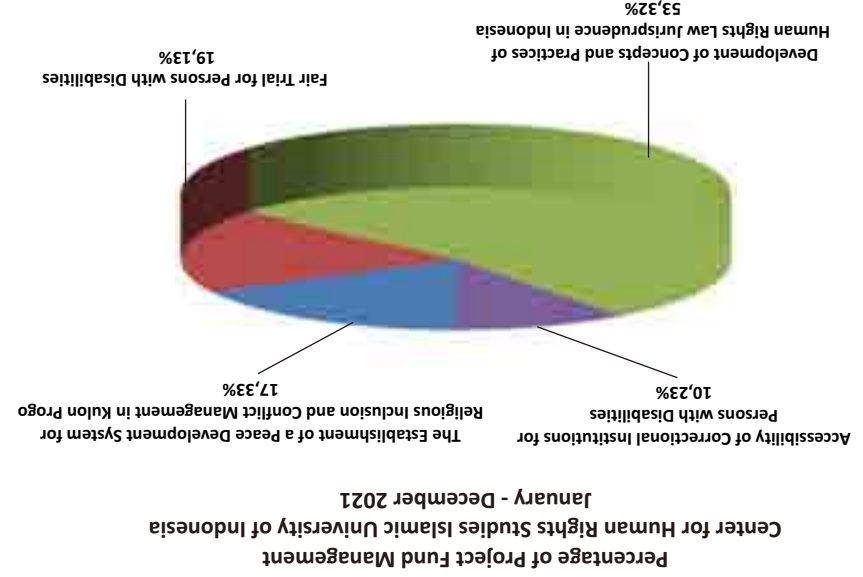
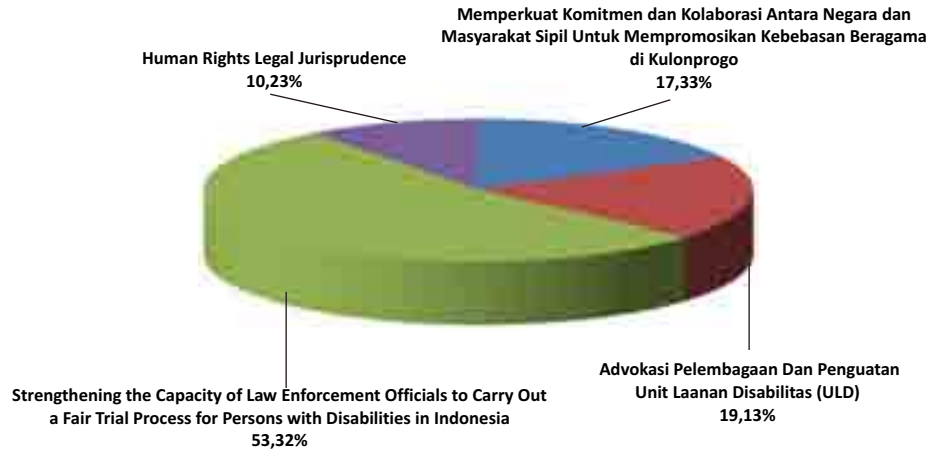


Laporan Keuangan

Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Januari - Desember 2021

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Terbangunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	438.697.434	17,33%	Januari - September 2021
2.	Advokasi Pelembagaan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD)	The Asia Foundation & AIPJ 2	484.414.130	19,13%	Januari - Desember 2021
3.	Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials to Carry Out a Fair Trial Process for Persons with Disabilities in Indonesia	AIPJ 2	1.350.000.000	53,32%	Januari - Desember 2021
4.	Human Rights Legal Jurisprudence	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	258.950.000	10,23%	Juni - Desember 2021
TOTAL			2.532.061.564	100,00%	

Prosentase Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Januari - Desember 2021



No.	Project	Donor Agency	Amount (Rp)	% ase	Period
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	438.697.434	17,33%	January - September 2021
2.	Accessibility of Correctional Institutions for Persons with Disabilities	The Asia Foundation & AIPJ 2	484.414.130	19,13%	January - December 2021
3.	Fair Trial for Persons with Disabilities	AIPJ 2	1.350.000.000	53,32%	January - December 2021
4.	Development of Concepts and Practices of Human Rights Law Jurisprudence in Indonesia	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	258.950.000	10,23%	June - December 2021
TOTAL			2.532.061.564	100,00%	

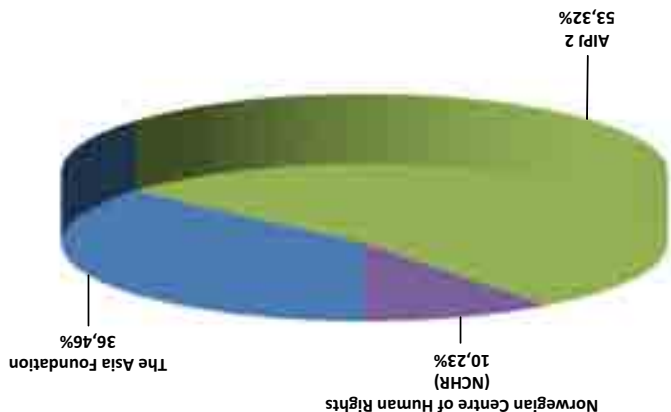
Project Fund Management Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia January - December 2021

Financial Statement

**Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Januari - Desember 2021**

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Terbanggunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	438.697.434	923.111.564	36,46%
	Advokasi Pelembagaan Dan Penguatan Unit Laanan Disabilitas (ULD)		484.414.130		
2.	Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials to Carry Out a Fair Trial Process for Persons with Disabilities in Indonesia	AIPJ 2	1.350.000.000	1.350.000.000	53,32%
3.	Human Rights Legal Jurisprudence	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	258.950.000	258.950.000	10,23%
Total			2.532.061.564	2.532.061.564	100,00%

**Prosentase Pengelolaan Dana Program
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Januari - Desember 2021**

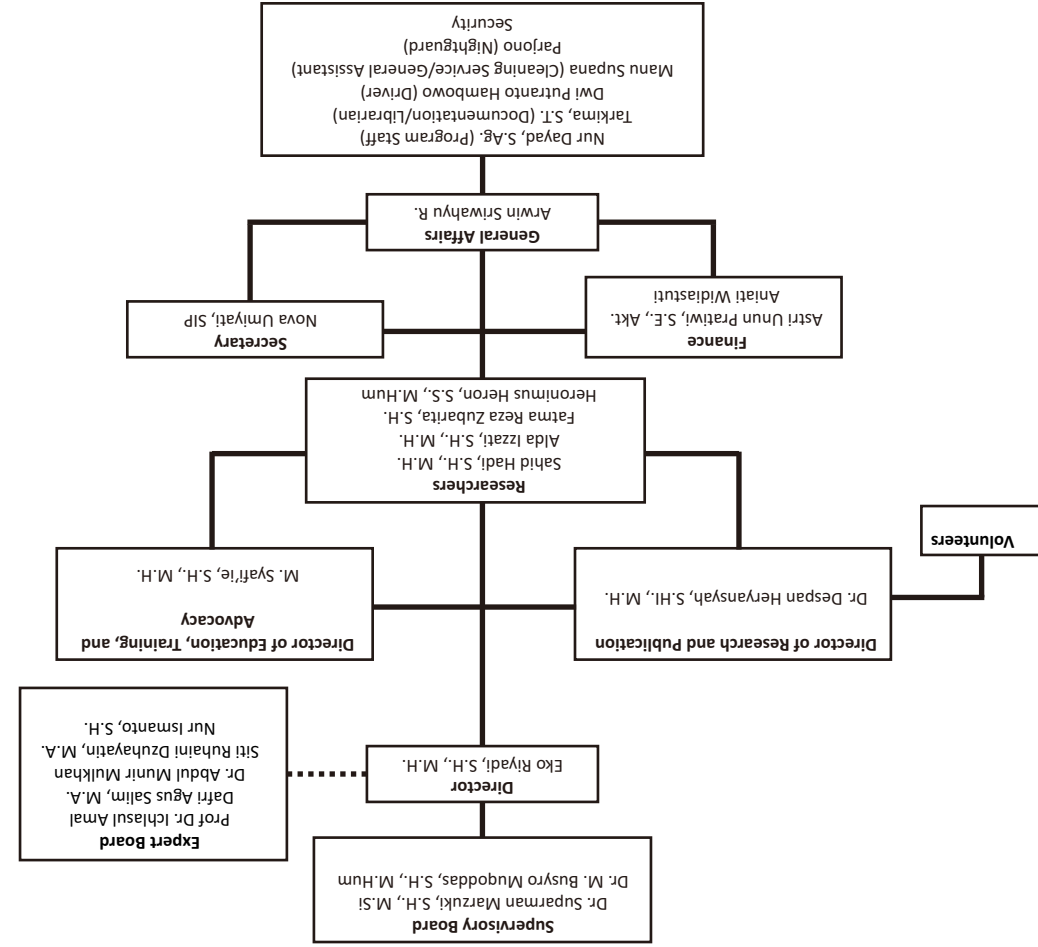
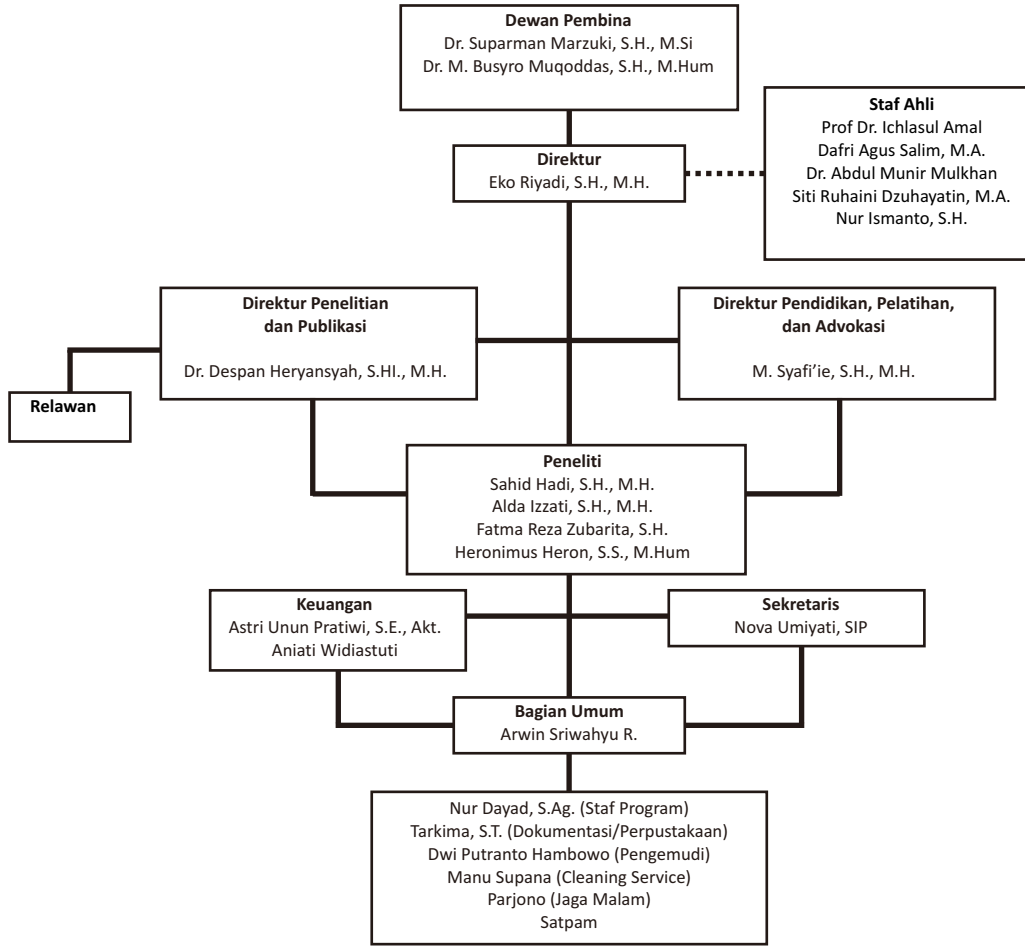


**Percentage of Project Fund Management
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia
January - December 2021**

No.	Project Title	Donor Agency	Amount (Rp)	Sub Total	% age
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	438.697.434	923.111.564	36,46%
	Correctional Database System Development with Disability Service Unit Features		484.414.130		
2.	Fair Trial for Persons with Disabilities	AIPJ 2	1.350.000.000	1.350.000.000	53,32%
3.	Development of Concepts and Practices of Human Rights Law Jurisprudence in Indonesia	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	258.950.000	258.950.000	10,23%
Total			2.532.061.564	2.532.061.564	100,00%

**Project Fund Management
Center for Human Rights Studies Islamic University Of Indonesia
January - December 2021**

Struktur Organisasi



Organization Chart